LAPORAN PENELITIAN

KOLABORATIF FAKULTAS ILMU SOSIAL

DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2016

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH

(Studi Kasus di Kota Gorontalo)

OLEH:

DR. SUKARMAN KAMULI, M.Si (KETUA)
NIDN: 0006066707
RASID YUNUS, S.Pd., M.Pd (ANGGOTA)
NIDN: 0024028401
UTEN UMAR (ANGGOTA)
NIM: 221414020
PRATIWI MARDJUN (ANGGOTA)
NIM: 221414043

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI PPKn

NOVEMBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FIS

Judul Kegiatan	: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH (Studi Kasus di Kota Gorontalo)
KETUA PENELITI	
A. Nama Lengkap	: Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
B. NIDN	: 0006066707
C. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
E. Nomor HP	: 085240216450
F. Email	: sukarman_kamuli@ung.ac.id
ANGGOTA PENELITI (1)	
A. Nama Lengkap	: Rasid Yunus, S.Pd.,M.Pd
B. NIDN	: 0024028401
C. Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Lama Penelitian Keseluruhan	: 1 tahun
Penelitian Tahun Ke	: 1
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp 10.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan	: - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,- - Dana Internal PT : - - Dana Institusi Lain : -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

(Dr. Sastro Mustapa Wantu, S.H.,M.Si)
NIP/NIK. 196609031996031001

Gorontalo, 29 Agustus 2016
Ketua Peneliti,

(Dr. Sukarman Kamuli, M.Si)
NIP/NIK. 196706062000031001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP/NIK. 196804091993032001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul : Strategi Pemberdayaan MasyarakatDalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah (Studi Kasus di Kota Gorontalo)

Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Dr. Sukarman Kamuli, M.Si	Kebijakan Publik	UNG	5 jam/minggu
2	Rasid Yunus	PKn	UNG	5 jam/minggu

Objek Penelitian : Aktivitas masyarakat dalam pengelolaan sampah

Masa Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun

Usulan Biaya : 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Lokasi Penelitian : Kota Gorontalo

Instansi yang terlibat : Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo

Temuan yang diharapkan: Model Pemberdayaan pengelolaan sampah

Kontribusi penelitian : Menjadi referensi bagi pemerintah dalam hal regulasi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Tujuan Khusus Penelitian 3
1.3 Urgensi Penelitian 3
1.4 Kontribusi Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah 5
2.2 Persepsi Masyarakat tentang Bank Sampah 7
2.3 Kerangka Pikir 11

BAB III METODE PENELITIAN 12

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 12
3.2 Subjek dan Objek Penelitian 12
3.3 Teknik Pengumpuan Data 12
3.4 Analisis Data 13
3.5 Lokasi Penelitian 13
3.6 Tahapan Penelitian 13

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 14

4.1 Biaya Penelitian 14
4.2 Jadwal Penelitian 14

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 16

5.1 Deskripsi Timbulan Sampah di Kota Gorontalo 16
5.2 Bank Sampah Mutiara 23

5.3 Hasil Peneltian..... 26
5.4 Pembahasan..... 40

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 51

6.1 Simpulan 51
5.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 53

DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Biaya Penelitian 15
2. Jumlah Penduduk Kota Gorontalo 17
3. Timbulan Sampah 18
4. Sampah Terporses 3R 19
5. Sampah Terangkut ke TPA 21

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah. Strategi pemberdayaan masyarakat tersebut dilihat dari 3 aspek, yaitu: pengetahuan, sikap dan perilaku; kerja kelompok/ team work; dan jaringan sosial/ relasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian adalah pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan Bank Sampah, yaitu; Kepala badan Lingkungan Hidup (BLH), Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BLH, Direktur Bank Sampah Mutiara, tenaga kerja Bank Sampah Mutiara, dan nasabah bank Sampah Mutiara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku pengelola bank sampah dan nasabah bank sampah Mutiara menunjukkan kecenderungan yang lebih baik. Buktinya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar 20% telah diproses melalui konsep 3R *(reduce, reuse, recycle).* Sampah-sampah itu selanjutnya siap diperpak dan dikirim ke pusat penampungan sampah di Surabaya. Dalam proses pengolahan sampah prasyarat yang harus dibangun adalah kerja sama kelompok atau team work harus kompak, sebab antara Bank Sampah Mutiara dan nasabah sampah merupakan satu kesatuan, disamping BLH melakukan pemantauan sebagai pihak yang memberdayakan pengelola sampah tersebut. Berikutnya Bank Sampah tidak dapat berkembang jika tidak membangun jejaring social/ relasi dengan para pihak termasuk Bank Sulut Cabang Gorontalo dan Inspektorat Kota Gorontalo. Pihak Bank Sulut telah memberikan bantuan modal usaha pada pengelola Bank Sampah Mutiara dan juga kepada para nasabah Bank sampah berupa fasilitas tabungan para nasabah Bank Sampah Mutiara ke Bank Sulut Cabang Gorontalo. Model pengelolaan sampah yang baik harusnya mensinergikan ketiga aspek: pengetahuan, sikap dan perilaku; kerja kelompok atau team kerja yang yang solid; dan membangun jejaring social/ relasi dengan para pelaku sampah yang ada di Kota Gorontalo. Sehingga sampah bukanlah barang tak berharga, tetapi mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Kata-kata Kunci: Pemberdayaan, Bank Sampah, Nasabah Bank sampah

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulisan laporan penelitian kolaboratif ini dapat dirampungkan sesuai rencana. Penelitian ini menguraikan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo, khususnya di 9 kecamatan (Kota Timur, Kota Tengah, Kota Utara; Kota Selatan, Kota Barat, Hulondalangi, Dungingi, Dumbo Raya, dan Sipatana). Masing-masing kecamatan tersebut menghasilkan timbulan sampah yang sangat variatif tergantung pada jumlah penduduk masing-masing.

Penelitian ini melibatkan mahasiswa dalam proses pengumpulan data sebagai sharing pengalaman agar kelak mereka dapat ilmu dan pengalaman saat melakukan penelitian diakhir studi mereka. Tim peneliti (dosen) dan mahasiswa menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu kritikan dan masukan sifatnya konstruktif mohon disampaikan ke tim peneliti.

Demikian laporan ini dibuat, semoga menjadi referensi bagi pembaca untuk selanjutnya dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian lanjutan. Terima kasih.

Gorontalo, November 2016

Team Peneliti,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah utama yang dihadapi pemerintah kaitannya dengan kesehatan lingkungan hidup adalah masalah sampah. Ketika persoalan sampah diperbincangkan, maka dalam pikiran mayarakat pada umumnya selalu bersentuhan dengan masalah teknis seperti ketidaktersediaan anggaran yang tidak mencukupi, dan keterbatasan sarana prasarana seperti bak sampah, Tempat Penampungan Sampah Sementara, kenderaan pengangkut sampah dll. Padahal ada aspek yang lebih utama di samping aspek teknis adalah manusia dan budayanya. Secara realiatas aspek yang diutamakan dalam penanganan sampah selalu tertuju pada master plan penataan drainase, bukan pada manusia dan budayanya. Padahal manusia dan budaya merupakan hal yang sangat terpenting tanpa mengecilkan aspek teknis.

Seiring dengan pemberian kewenangan kepada daerah melalui otonomi daerah, maka daerah diberi keluasaan dalam melakukan pengolahan sampah secara mandiri, mulai dari pendaurulangan/ pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang melibatkan pihak swasta. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) lebih leluasa dalam mengelola sampah di daerahnya, hal ini sangat jelas diatur dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, Permendagri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kenyataannya sampah tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi dapat dicegah dan dikurangi jumlahnya dengan pola 3 R sampah *(reduce, reuse, recycle)* dan penanganan sampah yang baik secara biologis maupun pemanasan, serta penggunaan sanitary landfill.

Kota Gorontalo telah tiga tahun berturut-turut (2013 – 2016) tidak lagi memperoleh Adipura sebagai predikat kota bersih, hal itu dikarenakan terlihat secara kasat mata sampah berserakan dimana-mana, air meluap di beberapa ruas jalan akibat saluran air tersumbat walaupun intensitas hujan rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah pada masalah penanganan sampah relatif rendah. Sesuai data awal tahun 2016 volume sampah yang dihasilkan setiap hari sekitar ± 450.000, sementara yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya berkisar 48%, artinya masih ada sekitar 42% yang tidak terangkut. Pertanyaannya adalah bagaimana sampah yang tidak terangkut tersebut, penanganannya seperti apa, dan bagaimana peran masyarakat dalam memaanfaatkan sampah sehingga bernilai ekonomi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sampah disisi lain merupakan material yang tidak bermanfaat bagi orang lain, tetapi bagi orang lain justru memberi nilai ekonomi sebagai sumber kehidupan. Sampah dapat ditemukan diberbagai tempat dengan jenis dan jumlah yang sangat banyak dan menjadi pemicu tersumbatnya saluran air serta menimbulkan bau busuk yang menyengat. Pemandangan tersebut seakan menjadi sesuatu yang biasa, bahkan terkesan bahwa untuk membersihkannya adalah tugas dari *cleaning service* yang dikontrak oleh pemerintah daerah. Ada kecenderungan "pembiaran" pada sampah-sampah yang berserakan dengan pemikiran karena sudah ada *cleaning service* yang akan membereskannya. Atau juga karena masyarakat telah membayar retribusi sampah, maka kepedulian sampah di lingkungan sekitarnya juga menjadi hilang.

Permasalahan tersebut di atas perlu dicari solusinya untuk menemukan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Hal ini penting dilakukan sebagai solusi untuk menjadikan masyarakat sadar akan lingkungan yang sehat dan membangkitkan jiwa wirausaha, sehingga target kota Gorontalo sebagai kota Adipura dapat dipertahankan secara terus menerus, bahkan diharapkan muncul inovasi baru dalam penataan lingkungan dan

kebersihan, termasuk terberdayanya masyarakat secara ekonomi maupun perilaku peduli sampah.

Mengacu pada tema unggulan penelitian sesuai RIP UNG 2015-2019, yaitu *"Strategi pemberdayaan potensi daerah untuk penguatan budaya dan kesejahteraan masyarakat",* dengan bidang unggulan *"Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat"* serta topik riset unggulan adalah *"Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".* Mengacu pada tema dan bidang unggulan, serta riset unggulan yang menjadi *frame research* UNG, maka penelitian ini diharapkan berkontribusi pada terberdayanya masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

1.2 Tujuan Khusus Penelitian

Keberhasilan suatu kebijakan atau program pemerintah sangat ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat secara suka rela, demikian halnya dengan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Oleh karena itu dengan penelitian ditargetkan: *Pertama* melahirkan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, sehingga *outcome* penelitian menjadi referensi bagi pemerintah daerah kota Gorontalo dalam mensuport masyarakat agar memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber ekonomi keluarga dan berkontribusi secara langsung pada kebersihan dan kesehatan lingkungan. *Kedua*, Pembentukan Bank Sampah Unit Kampus Unit UNG yang dikelola oleh HMJ PPKn Fakultas Ilmu Sosial kerjasam Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dan Bank Sampah Mutiara Kota Gorontalo.

1.3 Urgensi Penelitian

Sampah pada dasarnya merupakan material yang memiliki nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun dari aspek kesehatan lingkungan. Ketika sampah dimanfaatkan dengan secara proporsional dan dikelola secara professional, maka akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Disebagian daerah, khususnya pulau Jawa, Kalimantan (beberapa riset) telah mengangkat derajat kehidupan masyarakatnya, bahkan secara langsung telah mengangkat daerah/ kota yang terjorok (misalnya Kota Palembang tahun 2006) kini menjadi kota yang terbersih dan berhasil meraih tropi Asean Award untuk kategori Kota Bersih berwawasan lingkungan yang berkelanjutan *(Asean Suitable Environmentally City)* Hardiyansyah: 2014: 109)

Kota Gorontalo yang pernah menerima penghargaan Adipura beberapa tahun sebelumnya dan absen untuk beberapa tahun belakangan (2016 memperoleh kembali Adipura) bukan tidak mungkin bisa mengikuti jejak kota Palembang tersebut. Perolehan Adipura 2016 kota Gorontalo mengindikasikan bahwa masalah persampahan dan kebersihan kota sudah tertata kembali, tetapi hal itu harus lebih dimantapkan secara baik lagi dengan cara memanfaatkan Bank Sampah sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah agar bernilai ekonomi dan peduli kebersihan lingkungan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran secara konseptual tentang pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sampah sehingga bernilai ekonomi dan ikutannya pada kebersihan lingkungan melalui bank sampah. Sedangkan secara secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk mengambil

kebijakan dalam memberdayakan masyarakat melalui Bank sampah, apakah dalam bentuk Peraturan Walikota atau melahirkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemeritahan daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 mengamanahkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat tergantung pada penyelenggara pemerintahan di daerah. Semakin kreatif kepala daerah, baik Gubernur, Walikota dan Bupati akan sangat memberi warna perkembangan daerah itu sendiri. Urusan pemerintahan daerah dalam pasal 11 dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebersihan, sedangkan urusan pemerintahan pilihan di luar pelayanan dasar adalah lingkungan hidup (Pasal 12 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf e). Kedua urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Pasal 13 ayat 1).

Urusan pemerintahan tersebut (wajib dan pilihan) menjadi rujukan bagi pemerintahan daerah dalam menata daerahnya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk memudahkan urusan-urusan pemerintahan. Pemerintahan akan berjalan dengan baik, manakala terjadi sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak harus mendominasi dalam urusan wajib atau pilihan, tetapi perlu dukungan masyarakat. Pemerintah dalam konteks ini menurut Ariany dan Putera 2013 (*dalam*, Suyanto, dkk. 2015: 148) harus mampu melakukan koordinasi dengan baik, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan dengan tetap memposisikan pemerintah sebagai pengayom masyarakat sehingga setiap program yang dicanangkan dapat berhasil dengan baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada kenyataannya dalam pengelolaan sampah masih terkendala pada komitmen pemerintah daerah dalam hal: sarana

prasarana, anggaran, keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring masih kurang. Masalah sampah sangat berkaitan dengan urusan kesehatan dan lingkungan hidup.

Urusan kesehatan dan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat urgen untuk dicermati dengan baik, walaupun keduanya berbeda dalam urusan pemerintahan. Masalah yang mengancam kesehatan pada umumnya berasal dari lingkungan sekitar, seperti kebersihan rumah dan halaman rumah, juga kebersihan saluran air/ got dan lainnya. Biasanya yang terlihat secara kasat mata adalah sampah, baik sampah organic maupun anorganik. Padahal sampah itu memiliki nilai yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat, sampah adalah material yang tidak bermanfaat lagi, tetapi bagi sebagian yang lain justru sangat bernilai khususnya nilai ekonominya. Betapa banyak manusia yang hidup bahkan menjadi kaya raya hanya karena sampah tersebut. Kemampuannya untuk mengolah sampah menjadi material yang bernilai ekonomi ternyata berdampak pada kebersihan lingkungan. Pertanyannya adalah apakah masyarakat memahami manfaat sampah dimaksud, baik dari perspektif kesehatan, lingkungannya maupun untuk peningkatan kesejahteraan hidup?

Perhatian pemerintah terhadap sampah dimulai sejak tahun 2008, yaitu dengan terbitnya undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal tersebut dilatar belakang oleh beberapa pertimbangan: 1) semakin bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, maka dipastikan volume, jenis dan karakteristik sampah semakin beragam; 2) Perlu metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan; 3) Sampah menjadi permasalahan nasional, oleh karena itu harus dikelola secara komprehensif dari hulu sampai hilir, sehingga memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan 4) Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan

dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Kenyataan menunjukkan bahwa untuk kawasan perkotaan, termasuk kota Gorontalo sampah didominasi sampah rumah tangga dan sejenisnya. Sampah-sampah ini ditemukan dihampir semua tempat, baik kawasan rumah tinggal dan perumahan, tempat perbelanjaan seperti pasar, pertokoan, rumah makan juga di saluran-saluran air. Dalam konteks sampah rumah tangga dan sejenisnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pandangan Dwiyanto (2011: 245) tentang pemberdayaan mengacu pada konsep *empowerment* yang berarti mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki dan dapat memanfaatkannya dalam berbagai peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peluang usaha itu antara lain dalam hal pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Kemampuan membaca peluang usaha titik tekannya pada kapasitas individual, kerja team/team work, dan kemampuan menciptakan jejaring social.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan potensi masyarakat yang sudah ada untuk selanjutnya ditingkatkan kemampuan: 1) kemampuan individual (pengetahuan/wawasan, empati/perasaan kepedulian, sikap dan perilakunya); 2) kemampuan bekerja secara kelompok/team work; dan 3) kemampuan menciptakan link atau jejaring social. Kemampuan-kemampaun itu diharapkan mampu diterapkan dalam pengelolaan Bank Sampah dengan konsep 3R *(Reduce, Reuse, and Recycle).*

2.2 Persepsi Masyarakat tentang Bank Sampah

Sampah pada umumnya dipersepsikan sebagai suatu material/ benda yang tidak lagi berguna bagi dirinya sehingga dibuang atau ditempatkan di tempat khusus atau penampungan sampah. Sampah yang ditempatkan pada tempatnya tersebut

bukan berarti masalahnya sudah selesai, tetapi harus ditindaklanjuti dengan memindahkanya ke tempat pembuangan akhir oleh petugas khusus. Tumpukan sampah, apalagi sampah yang tidak beraturan akan sangat mengganggu pandangan secara estetika maupun dari aspek kesehatan. Untuk menghindari tumpukan sampah apalagi sampah yang tidak beraturan, maka sering dijumpai tulisan-tulisan "jangan buang sampah sembarangan", "buanglah sampah pada tempatnya" dan lain-lain. Tulisan-tulisan itu menandakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami bagaimana memperlakukan sampah yang baik dan tidak mengganggu pemandangan dan kesehatan.

Kebiasaan buruk masyarakat memperlakukan sampah masih saja terjadi, apalagi jika retribusi sampah telah dipenuhi. Artinya tanggungjawab memperlakukan sampah dianggap sudah menjadi tanggung jawab petugas sampah, akibatnya serakan sampah seolah menjadi pemandangan yang biasa-biasa saja. Sebagian kecil masyarakat yang peduli tentang hal itu, tetapi kebanyakan yang tidak peduli, sehingga lama kelamaan yang peduli itu akhirnya juga tidak peduli lagi. Tantangannya adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli dengan cara atau pendekatan lain. Cara atau pendekatan itu tentunya didasarkan pada kecenderungan masyarakat untuk akhirnya menjadi keinginan secara terus menerus terbangun, sehingga sampah tidak menjadi barang yang tak bernilai. Bahkan menjadi sesuatu yang diburu masyarakat, dan dampaknya pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Penanganan sampah pada umumnya menurut Muhamad, dkk: 2012: 695 masih menggunakan paradigma lama yaitu: kumpul – angkut – buang, sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah sampah. Paradigm baru mengacu pada UU 18/2008 dan PP No. 81/2012 pengelolaan sampah dilakukan dengan konsep 3R *(Reduce, Reuse* dan *Recycle)*. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R tersebut sebaiknya dilakukan diawal saat masyarakat atau kelompok masyarakat, perusahaan, rumah makan dan lainnya waktu sampah dihasilkan. Tetapi dalam pandangan Aryenti: 2012 (*dalam*, Darmawan: 2014) pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep 3R itu hingga sampai ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (PTST).

Penerapan 3R menurut Dwiyanto (2011: 241-242) harus dilakukan dengan tahapan perencanaan teknis yang matang. Tahapan itu meliputi: 1) persiapan; 2) pemilihan lokasi; 3) perencanaan teknis; 4) pengorganisasian masyarakat; dan tahap evaluasi dan uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara konsisten agar 3R dapat terlaksana dan dampaknya akan langsung dinikmati masyarakat, baik terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih maupun terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga ikutannya pada pendapatan masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia. Sampah harusnya dikelola dengan baik agar tidak menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri, baik kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan maupun pemicu meluapnya sungai, saluran air dan maupun penyebab genangan air, dan lain-lain. Menurut Kristina (2014: 19-20) intervensi pemerintah dalam pengelolaan Bank Sampah menjadi langkah awal yang baik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam memperlakukan sampah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor kunci keberlanjutan pengelolaan system bank sampah hanya akan terjadi jika sistemnya didampingi oleh para stakeholdernya yang terkait dengan system pemberdayaan masyarakat dalam bank sampah.

Darmawan (2014: 177) mengidentifikasi permasalahan persampahan sebagai akibat dari aktivitas/ perilaku manusia meliputi: 1) Masih banyaknya volume timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat; 2) Masyarakat masih belum memiliki tempat sampah yang standar untuk membedakan antara sampah organik dan anorganik; 3). Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ternyata masih bercampur antara sampah organic dan sampah anorganik; 4) Masyarakat belum berperan aktif untuk memanfaatkan sampah; 5) Masih terlihat adanya sampah di sungai dan di pinggir pantai. Permasalahan tersebut secara real karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sampah itu, sebab selama ini sampah selama ini pengukuran sampah dilakukan secara kuantitatif parsial seperti: nilai omzet, jumlah sampah yang terkelola, jumlah nasabah aktif. Oleh karena itu harus dipikirkan

bagaimana system yang dibangun dengan mempertimbangkan pada ukuran efektivitas dan efisiensi bank sampah (kuantitas, kualitas dan waktu) bisa dicapai (Kristina, 2014: 20).

Memperhatikan permasalahan sampah tersebut berbagai langkah telah dilakukan dibeberapa kota di Indonesia. Beberapa kota dimaksud antara lain Banten yang telah menerapkan Bank Sampah sejak 5 Juli 2008 dengan nama Bank Sampah Gemah Rimah yang dipelopori Gelar Priambodo. Bank sampah tersebut awalnya sulit diterima masyarakat karena manfaatnya belum diketahui baik dari aspek kesehatan, lingkungan dan aspek ekonomi. Setelah dilakukan sosialisasi terus menerus, maka secara perlahan Bank Sampah telah berkembang dan sangat memberi manfaat bagi masyarakat Banten, khususnya Dusun Badegan. Tidak serta merta setiap program mulus dalam implementasinya, banyak faktor yang mempengarahinya. Contoh kasus dalam menangani masalah sampah atau bank sampah di Pronggodani Sleman Yogyakarta faktor yang menjadi kendala adalah faktor pengetahuan, kebiasaan, geografis dan ekonomi (Mohamad, dkk: 2012: 696).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah di Kota Gorontalo adalah bagaimana mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, yakni masyarakat itu sendiri dan volume sampah yang melimpah baik yang tertampung di tempat-tempat penampungan sampah yang disediakan sendiri oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Sampah sebagai sumber kehidupan diharapkan mampu merubah persepsi masyarakat, khususnya persepsi tentang sampah yang dianggap material yang tidak memiliki nilai ekonomi. Merubah persepsi itu perlu intervensi managerial pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Target pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan sampah pada 2018 adalah Kota Gorontalo bebas sampah, melampaui target nasional bebas sampah tahun 2020.

2.3 Kerangka Pikir

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah berorientasi akhir pada terberdayanya masyarakat dari aspek terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta terbukanya lapangan kerja sehingga sumber daya yang ada di sekitar bernilai ekonomis. Disamping itu juga akan tercipta generasi yang cinta akan sehat dan bersih baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu kerangka pikrr dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

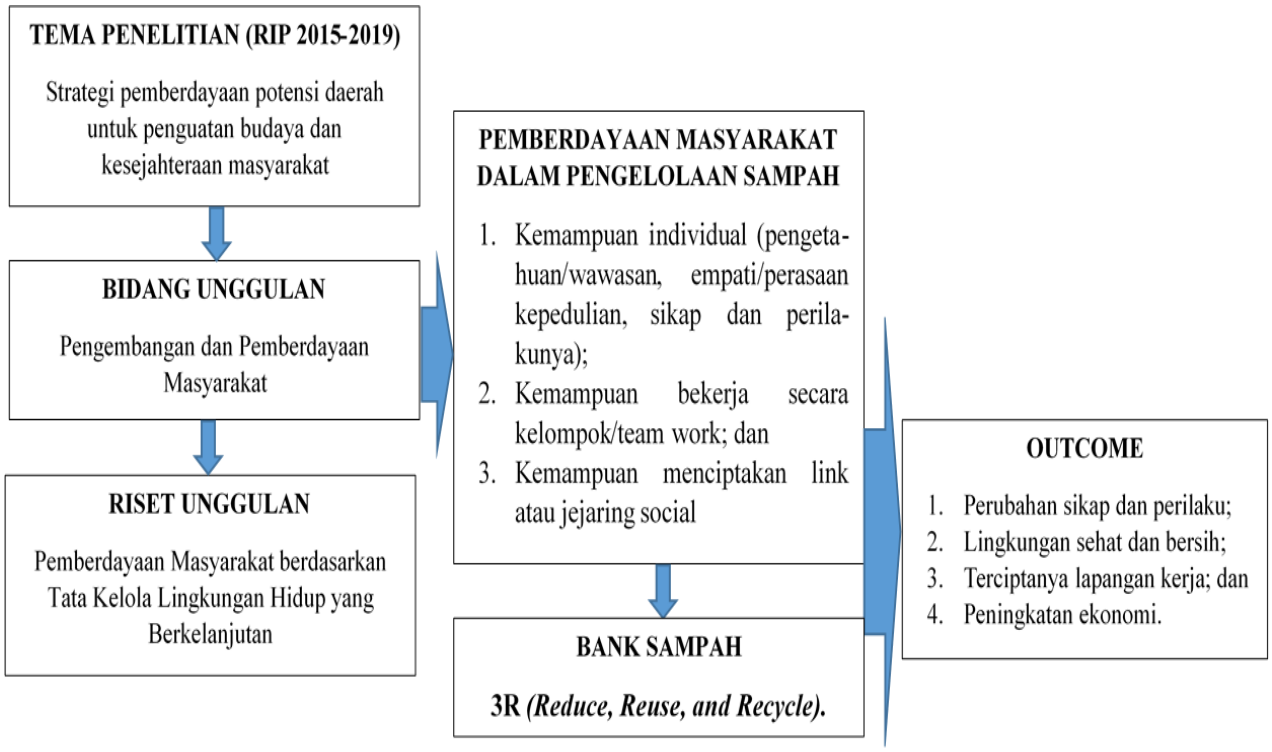

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang ditelusuri meliputi data primer yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup dan Aparat Kelurahan di Kecamatan Kota Timur. Selanjutnya data sekunder berupa dokumen berupa laporan perkembangan volume sampah, kondisi daya tampung TPA, dan master plan perencanaan pengolahan sampah Kota Gorontalo.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Gorontalo, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BLH, aparat Kelurahan Moodu, Pengelola Bank Sampah Mutiara dan nasabah Bank Sampah, petugas Kebersihan/cleaning service. Objek penelitian adalah aktivitas yang dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;
2. Wawancara dilakukan untuk mendalami pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang dimotori Badan Lingkungan Hidup, kelompok-kelompok usaha Bank Sampah, Pengepul Sampah dan tokoh masyarakat;
3. Focus Group Discution (FGD). FGD merupakan suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan mengadobsi model analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman (1984). Model tersebut meliputi: (a) *Reduction data*, verifikasi data untuk kepentingan penyederhanaan data untuk mempertajam data yang dibutuhkan; (b) *Display Data*, menyajikan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga membentuk suatu kompoen yang utuh dan terpadu; serta (c) *Conclusion*, melakukan interpretasi data sebagai langkah penentuan dalam penarikan kesimpulan. Model analisis data tersebut selanjutnya disajikan secara komprehensif, sehingga melahirkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Gorontalo dengan mengambil Kota Timur sebagai sampel lokasi penelitian. Lokasi ini menjadi target penelitian karena pengelolaan sampah melalui Bank Sampah telah diimplementasikan selama 3 tahun terakhir (2013 – 2016).

3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dengan:

1. Penyiapan administrasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.
2. Menelusuri narasumber yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah; dan
3. Menelusuri berbagai permasalahan dan peluang dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah;

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Biaya Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 5 bulan (Agustus-Desember 2016). Rincian anggaran biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut:

TABEL 1

BIAYA PENELITIAN

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Biaya Pengumpulan Data (Wawancara, Observasi, FGD, dan penelusuran dokumen)	6.150.000
2	Bahan habis pakai & peralatan	650.000
3	Penjilidan laporan	450.000
4	Dokumentasi	250.000
5	Pembentukan Bank Sampah Unit UNG (pengelolaannya oleh HMJ PPKn)	2.500.000

4.2 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan selama 5 bulan terhitung Agustus s.d Desember 2016. Jadwal penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan Ke					KET
		1	2	3	4	5	
1	Penyusunan Proposal						
2	Pelaksanaan Penelitian						
3	Analisa Data						
4	Penyusunan Laporan						

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Timbulan Sampah di Kota Gorontalo

Kota Gorontao merupakan daerah terkecil dibandingkan dengan lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Luas wilayah Kota Gorontalo hanya berkisar 0,73% atau luas wilayahnya sebesar 64,79 KM, dan secara geografis wilayah Kota Gorontalo terletak antara 000 28' 17" - 000 35' 56" lintang utara (LU) dan 1220 59' 44" -1230 05' 59" bujur timur (BT). Kota Gorontalo memiliki 9 (Sembilan) kecamatan dengan luas dan jumlah penduduk yang bervariasi. Sembilan kecamatan tersebut meliputi: Sipatana, Kota Timur, Kota Tengah, Kota Utara, Kota Barat, Kota Selatan, Hulondalangi, Dungingi dan Dumbo Raya.

Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo sangat strategis dalam segala aspek kehidupan manusia, khususnya dalam layanan jasa. Layanan jasa dimaksud dalam hal ini seperti layanan dibidang pendidikan, pusat transaksi bisnis (seperti rumah makan, hotel, kos-kosan, pusat perbelanjaan, foto copy/ percetakan showroom dan lain-lain berdampak pada timbulan sampah dalam jumlah yang besar. Jumlah sampah yang besar itu menimbulkan permasalahan baru yang perlu penanganan yang ekstra ketat, khususnya instansi berwewenang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH). Tuntutan menuntaskan persoalan sampah secara komprehensip dan berwawasan lingkungan, serta bernilai ekonomi tidak hanya tanggungjawab BLH semata, tetapi perlu keterlibatan semua unsur. Unsur-unsur itu adalah semua elemen masyarakat yang menghasilkan timbulan sampah yang sangat besar, khususnya tempat-tempat usaha dalam skala menengah ke atas.

Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo menjadi pusat kunjungan masyarakat dari seluruh daerah yang ada di wilayah Gorontalo.

Konsekuensi dari kunjungan tersebut berdampak pada timbulan sampah dalam jumlah yang besar

Timbulan sampah yang berasal dari masyarakat volumenya tidak terlalu besar, hanya berkisar pada sampah rumah tangga, seperti kertas, plastik, sisa-sisa makanan, kulit buah, dan lain-lain. Lain halnya dengan rumah makan, maal atau tempat-tempat perbelanjaan, pasar dan lain-lain. Semakin banyak timbulan sampah berarti berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar pula, artinya semakin besar jumlah penduduk berarti semakin banyak jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Timbulan sampah yang banyak akan berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesehatan warga masyarakat sekitarnya.

Berikut ini akan diuraikan tentang: 1) sebaran penduduk pada masing-masing kecamatan; 2) timbulan sampah yang dihasilkan dalam M3 pada masing-masing kecamatan; 3) proses pengolahan sampah melalui 3R *(Reduce, Raice, dan Recycle)*; 4) proses pengangkutan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA); 5) dan total sampah yang terproses; serta 6) sampah yang tidak terproses. Sebaran penduduk di 9 kecamatan Kota Gorontalo sesuai data dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 2

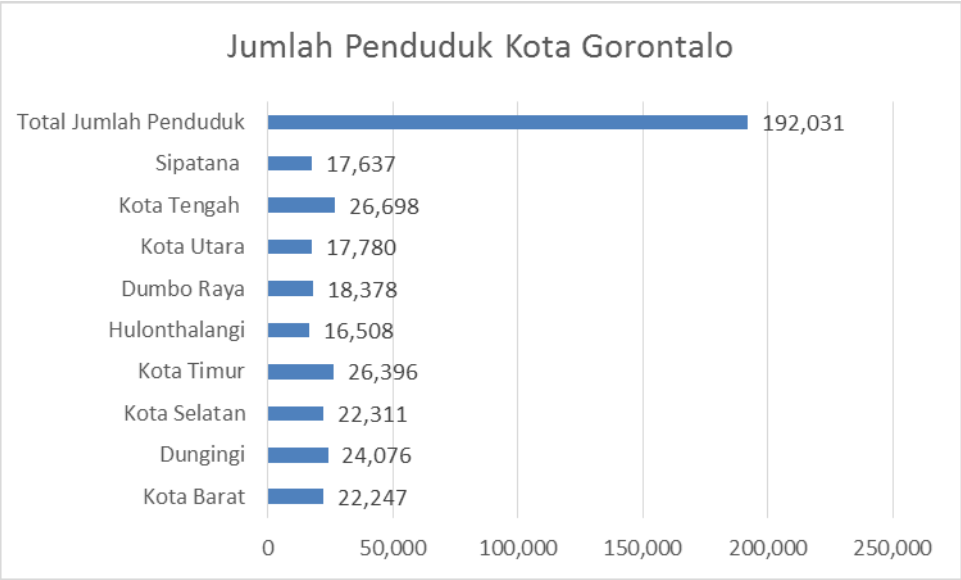

Sumber: Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, 2016

Berdasarkan data tersebut, maka kecamatan Kota Tengah yang menduduki posisi tertinggi jumlah penduduknya dibandingkan dengan 8 kecamatan lainnya, kemudian diikuti kecamatan Kota Timur peringkat kedua, dan peringkat ketiga adalah kecamatan Dungingi, demikian seterusnya. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar juga timbulan sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

TABEL 3

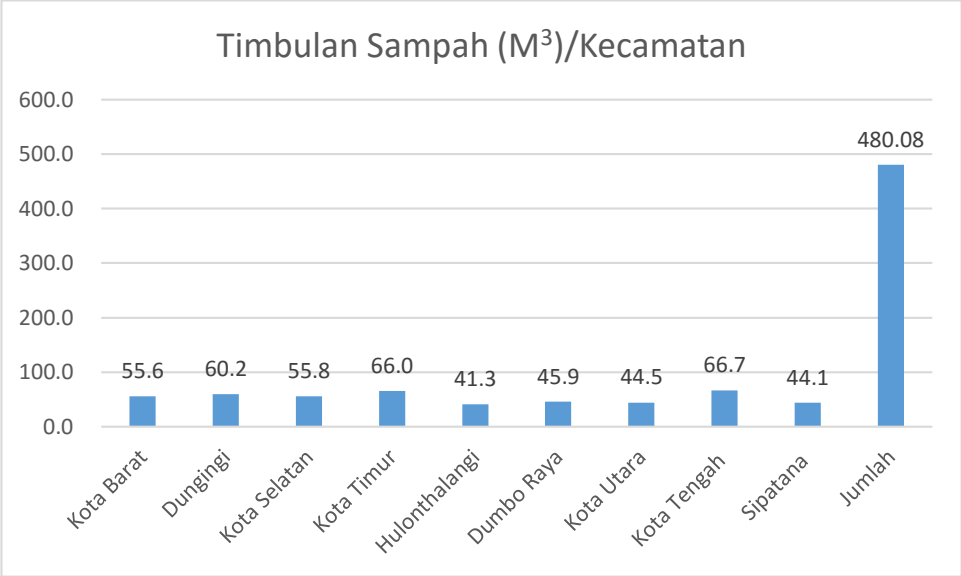

Sumber: Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, 2016.

Mengacu pada data timbulan sampah tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang besar memberi kontribusi yang sangat besar pula pada timbulan sampah. Artinya semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula sampah yang dihasilkan. Hal ini merupakan ancaman bagi pemerintah dan masyarakat, jika sampah tidak dikelola melalui proses 3 R. Konsekuensinya timbulan sampah yang besar menjadi ancaman bagi keseimbangan lingkungan yang berdampak pada kesehatan lingkungan itu sendiri dan ancaman bagi penduduk sekitarnya. Sampah akan berserakan dimana-dimana, bahkan mengancam saluran-saluran air yang ada, akibatnya limpahan air menggenangi jalan dan menghambat kelancaran lalu lintas.

Umumnya sampah yang berserakan di hampir selokan semua jalur jalan di Kota Gorontalo adalah sampah-sampah plastic, seperti botol-botol/kaleng minuman, plastic makanan, kertas-kertas dan bekas wadah makanan ringan, dan lain-lain. Kenyataannya secara perlahan sampah-sampah tersebut sudah mulai berkurang volumenya. Hal itu terjadi karena: 1) petugas pengangkut sampah (mobil dan gerobak) telah melakukan pemilahan sampah yang bernilai ekonomi dan selanjutnya ditampung untuk diteruskan ke Bank Sampah yang telah ada; 2) petugas kebersihan/ *cleaning service* di jalan-jalan yang berjumlah kurang 290 orang (pasukan kuning); 3) nasabah-nasabah yang tersebar di berbagai wilayah/ kecamatan di kota Gorontalo melalui ketua-ketua kelompok (nasabah secara berkelompok). Nasabah berkelompok tersebut seperti: SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Negeri dan Swasta. Melalui nasabah-nasabah tersebut pengolahan sampah telah dilakukan melalui konsep 3 R *(Reduce, Reuse, and Recycle)*. Hasil pengelolahan tersebut dapat diuraikan pada table berikut:

TABEL 4

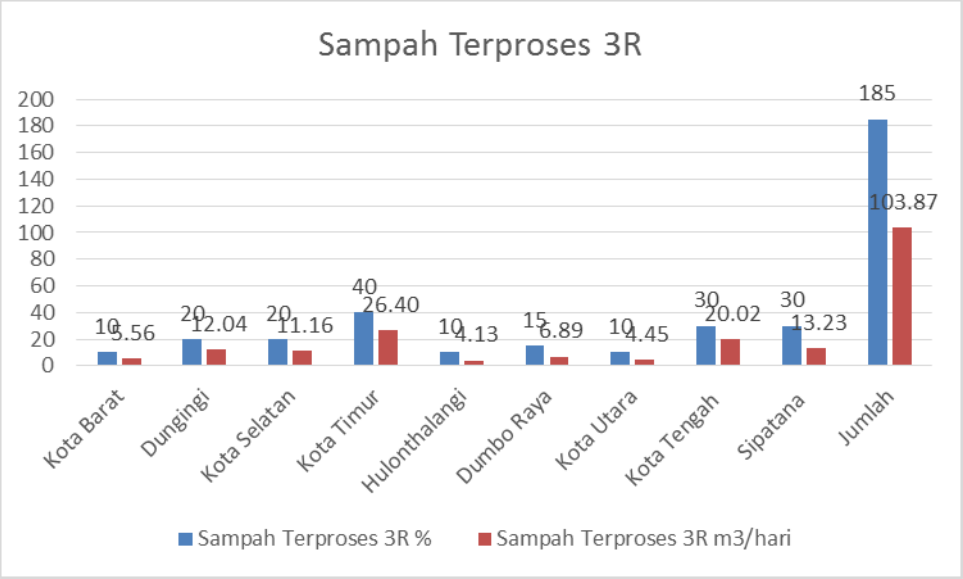

Sampah yang terproses melalui 3R didominasi kecamatan Kota Timur. Data tersebut dapat dilihat dari data timbulan sampah 66 M^3, data sampah yang terproses melalui 3R mencapai 40 M^3. Jika dibandingkan dengan timbulan sampah pada table

2, maka Kecamatan Kota Tengah menempati posisi tertinggi yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak sebesar 66,7 M^3. Data ini menunjukkan bahwa ada keseriusan Kota Timur (nasabah, perangkat kelurahan dan unsur lainnya) dalam menangani sampah melalui proses 3R. Kota Timur sebagai salah satu pilot proyek menangani sampah melalui 3R, sehingga data timbulan sampahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kota Tengah sebagai penghasil timbulan sampah tertinggi. Sebagai Kecamatan yang terdekat dengan lokasi Bank Sampah (Bank Sampah Mutiara), maka Kota Timur tercatat sebagai Kecamatan yang mampu mengolah sampah dengan kapasitas yang terbesar. Akumulasi sampah yang terproses melalui 3R dari ke 9 Kecamatan mencapai 103,87 M^3/hari dari produksi sampah yang dihasilkan penduduk (9 Kecamatan) mencapai ± 480,08 M^3/hari.

Sampah yang tidak terkelola atau masuk dalam kategori sampah yang tidak dapat diolah lagi diteruskan ke Tempat Penampungan Akhir. Sampah yang tidak dapat diolah seperti plastik-plastik bungkusan atau plastic lebel minuman, bungkusan barang/mainan, bungkusan pakaian, plastic bekas makanan instan/ siapa saji, dan lain-lain yang umumnya yang berserakan dimana-mana. Sampah seperti ini tidak bernilai ekonomi sama sekali, sehingga tidak menjadi sasaran para nasabah bank sampah termasuk para pemulung sampah. Sampah yang terangkut ke TPA berkisar 12,3% atau 28 $M^{3/}$hari s.d 25,4% atau 38 M^3/hari. Jika diakumulasi rata-rata/hari sampah yang terangkut ke TPA ± 300M^3/hari dari total jumlah sampah yang dihasilkan 480,08M^3 setelah dikurangi sampah yang terproses melalui 3R 103,87M^3. Data berikut menggambarkan sampah yang terangkut ke TPA dari 9 kecamatan yang sangat variatif dan cenderung positif.

TABEL 5

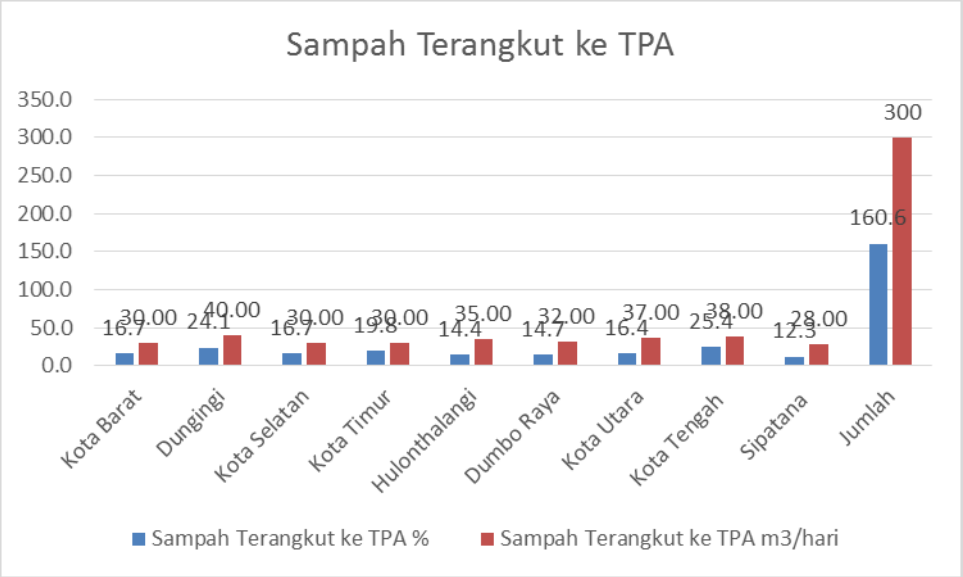

Sampah yang terangkut ke TPA yang berasal dari 9 Kecamatan mencapai ±300M^3/hari setelah dikurangi sampah yang terporses melalui 3R. Variasi jumlah sampah setiap kecamatan yang diangkut ke TPA dari data pada table 4 menunjukkan keragaman yang tidak terlalu signifikan. Kecamatan yang tertinggi jumlah sampah terangkut ke TPA adalah Kecamatan Dungingi mencapai 40M^3/hari dengan timbulan sampah 60,2M^3/hari dibandingkan dengan Kecamatan Kota Tengah dengan timbulan sebesar 66,7M^3/hari dan terangkut ke TPA hanya mencapai 38M^3/hari. Jika melihat trend pengelolaan sampah, baik melalui proses 3R maupun sampah yang diangkut ke TPA menunjukkan kemajuan yang cukup berarti yang mencapai 403.9M^3/hari. Kemajuan tersebut nampak pada table 5 sebagai berikut:

TABEL 6

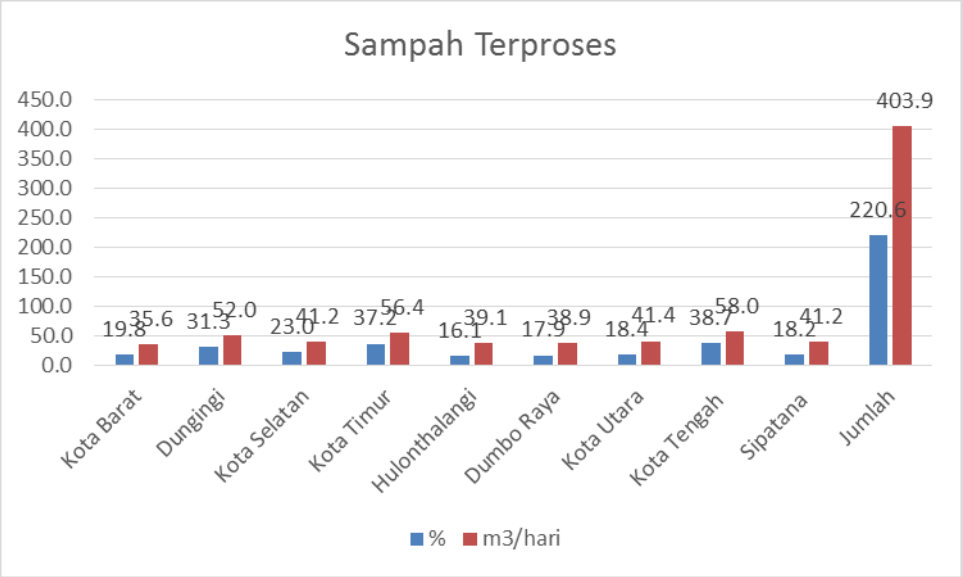

Data pada table 5 tersebut menunjukkan bahwa total timbulan sampah yang terproses mencapai 403,9 M^3 dari total sampah yang dihasilkan yaitu 480,08 M^3. Bila dihitung sampah yang terproses dari 9 kecamatan secara keseluruhan berkisar ± 98,8 % atau sampah yang tidak terproses tinggal ± 1,2%, atau sekitar 76,2M^3/hari. Memperhatikan jumlah penduduk yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar peluang timbulan sampah yang terjadi. Peluang untuk memaksimalkan pengelolaan sampah melalui konsep 3R masih besar, hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah nasabah sampah pada setiap kecamatan yang ada melalui berbagai cara. Jika memperhatikan jumlah sampah yang tidak terproses tersebut dapat dikatakan masih dalam batas yang wajar sepanjang tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Data sampah yang tidak terproses dalam sehari mencapai 76,2M^3 berarti jika dihitung selama 1 bulan (30 hari) maka timbulan sampah akan mencapai 2.286M^3/bulan. Sampah yang tidak terproses tersebut dalam jangka panjang akan menjadi ancaman bagi kelangsungan Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPA). Permasalahannya adalah upaya mengupayakan sampah yang bermanfaat melalui proses 3R yang belum maksimal. Hal itu terjadi karena masih sebagian kecil

masyarakat yang mau dan berkeinginan memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan tambahan selain pekerjaan utamanya.

TABEL 7

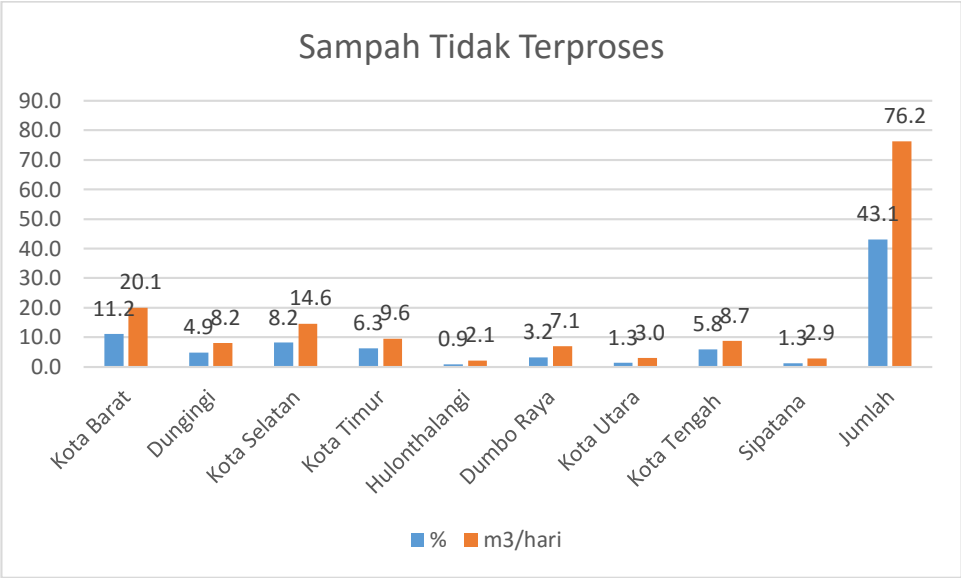

Gambaran data sampah yang telah dipaparkan melalui keenam table tersebut merupakan sumber informasi untuk ditindaklanjuti dalam menanggulangi timbulan sampah. Timbulan sampah harus terus dikurangi, salah satunya dengan menggalakkan berdirinya Bank-Bank Sampah baru selain Bank Sampah Mutiara yang sudah ada sekitar 18 Bulan yang lalu.

5.2 Bank Sampah Mutiara

Sampah merupakan ancaman bagi kehidupan manusia, jika tidak dikelola dengan baik. Disisi lain sampah merupakan sumber rezeki/kehidupan bagi masyarakat yang mampu menjadikannya sebagai peluang usaha baru untuk menambah penghasilan. Sampah dapat ditemukan dimana-mana, sehingga dapat dikatakan bahwa sampah sangat berlimpah. Sampah yang berlimpah itu bagi yang memiliki naluri peluang usaha adalah rezeki yang sangat banyak dan bisa membuat kaya raya. Naluri itu tentunya harus dibangun dengan menjalin kerjasama dengan

berbagai unsur yang ada, utamanya yang memiliki otoritas kekuasaan dan pemodal yang berniat baik untuk memodali mereka yang memiliki naluri usaha dimaksud.

Umumnya mereka yang memiliki naluri usaha dibidang sampah adalah masyarakat kecil yang tidak memiliki skill yang memadai dan modal yang mampu menggerakkan dan membangkitkan naluri usaha dimaksud. Perlu intervensi dari pemerintah dan pemodal dalam hal ini. Pemerintah memiliki otoritas melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara pihak pemodal, baik itu lembaga keuangan (Bank) atau lembaga lainnya maupun pengusaha perseorangan yang diharapkan dapat memfasilitasi seperti peralatan yang dibutuhkan maupun tempat penampungan sampah. Selain itu keterbatasan pemahaman para pengepul atau pemulung sampah masih jauh dari harapan, kalaupun ada masih sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tidak serius menekuni pekerjaan tersebut. Memang disadari pekerjaan menjadi pemulung atau pengepul sampah terkesan tidak bersih, tetapi itu karena teknis dalam memperlakukan sampah-sampah yang "bernilai" itu dilakukan dengan baik dan benar.

Menangkap peluang di depan mata tentang "sampah" yang bernilai ekonomi itu, salah seorang yang menekuni sampah sejak tahun 1984 yang bernama "Purwanto" mencoba memantapkan usahanya dengan mendirikan Bank sampah yang diberi nama "BANK SAMPAH MUTIARA" beralamat di kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Keberadaan Bank Sampah tersebut berawal dari pendataan usaha-usaha yang ditekuni masyarakat oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk diberdayakan melalui bantuan yang sifatnya produktif. Sesuai hasil survey yang dilakukan dan didukung oleh data kelayakan usaha berupa tenaga kerja, tempat penampungan sampah, jumlah sampah yang masuk dan keluar setiap hari dan jaringan yang dibangun melalui nasabah-nasabah bank sampah. Nasabah-nasabah dimaksud adalah mereka yang menyiapkan/ mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomi untuk selanjutnya dimasukkan ke Bank Sampah Mutiara. Pemasukan sampah dapat dilakukan dengan cara: 1) diantar sendiri oleh

para nasabah ke Bank Sampah Mutiara; dan 2) dijemput di tempat-tempat atau penampungan sampah yang telah disepakati bersama dengan nasabah.

Proses penjemputan sampah merupakan cara untuk memudahkan para nasabah agar tidak tiap hari mereka mengantar sampah ke Bank Sampah yang memakan biaya pengantaran. Para nasabah cukup mengumpulkan sampah-sampah itu pada tempat yang dimiliki kelompok-kelompok sehingga bisa mencapai berat sekitar 50 s.d 100 kg. selanjutnya sampah itu ditimbang dan dan dibayar langsung di tempat itu. Proses tersebut berlangsung terus menerus setiap hari, kecuali jika hujan turun untuk menghindari sampah basah seperti kertas, kardus, bekas tempat telur, dll. Purwanto sebagai Pimpinan Bank Sampah Mutiara sangat proaktif menekuni pekerjaan dalam mengelola sampah. Strategi jemput sampah pada para nsabah dilakukan dengan maksud: 1) menjalin ikatan emosional antara pengelola Bank Sampah dengan para nasabah agar semangat para pengepul/pemulung sampah tetap berlanjut melakukan pengelolaan sampah melalui konsep 3 R *(Reduce, Reuse, and Recycle)*; dan 2) sebagai strategi membangun jiwa enterprenaur para nasabah bank secara berkelanjutan, bahkan diharapkan bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah bank sampah mampu menyebarluaskan ke warga sekitarnya untuk memanfaatkan sampah dalam menambah pendapatan keluarga.

Berikut ini pengelola Bank Sampah Mutiara yang merupakan satu-satunya Bank Sampah yang ada di Kota Gorontalo sebagai berikut:

Nama	**Jabatan**	**Ket**
Junaedi Kiayi Demak	Kepala BLH Kota Gorontalo	
Jusmiaty Taha Kiayi Demak	Direktur Utama	
Direktur Pelaksana	Purwanto	
Sekretaris	Samsu Rizal	
Bendahara	Siti Fatimah	
Pemasaran	Ali Akbar	
Nasabah	1. SEKOLAH (SD, SMP, SMA) SE KOTA GORONTALO 2. Masyarakat Wilayah Kota Timur, Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Utara, Kota Barat, dan Dungingi.	

Sumber: Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, 2016

5.3 Hasil Penelitian

Keberhasilan pembangunan secara keseluruhan syarat minimal yang harus dipenuhi adalah keikutsertaan masyarakat secara suka rela dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa memiliki. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki pada masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah menjadi seni tersendiri. Betapa tidak masyarakat ditingkat bawah tersebut memiliki keterbatasan SDM (pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku) yang patut dicari solusinya. Keterbatasan SDM bukan berarti mereka tidak mau dan tidak mampu dalam melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan pembangunan, tetapi bagaimana caranya merubah keterbatasan itu menjadi potensi yang kuat dan menguntungkan. Umumnya SDM yang rendah itu mudah diajak kompromi dalam melakukan perubahan-perubahan asalkan dikomunikasikan dengan cara yang baik, santun, dan tetap menjaga saling percaya satu dengan lain. Selain itu harus pula dilakukan upaya pendampingan yang intensif dalam melakukan pemberdayaan, sebab jika pendamping (tenaga pendamping) pemberdayaan tidak memiliki kecakapan memadukan substansi pemberdayaan dengan kondisi lingkungan social, dan psikologi masyarakat maka akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat. Kesalahan atau kekeliruan (sengaja maupun tidak) yang ditimbulkan, maka untuk membangun kembali kepercayaan itu akan sangat sulit dilakukan.

Inti dari pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya menjadi lebih berdaya dari aspek kemampuan individual dan kelompok yang meliputi pengetahuan dan wawasan, empati atau perasaan kepedulian, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan menjadi kekuatan team sehingga mampu menciptakan team work yang saling bersinergi satu dengan lainnya. Kerja team dimaksud adalah bagaimana antara pengelola bank sampah Mutiara dan para pemulung/pengepul sampah saling mendukung. Bentuk dukungan itu adalah pihak Bank Sampah mampu membayar setiap hari atau sesuai kesepakatan pembelian sampah yang telah diproses melalui 3R secara rutin dan langsung lunas dibayar

ketika transaksi. Transaksi itu dapat dilakukan di Bank Sampah sendiri, di rumah atau tempat usaha (warung, kios, dan took) para nasabah sampah.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui konsep 3R *(Reduce, Reuse, dan Recycle)* diarahkan dalam membangun kemampuan dari aspek: a) pengetahuan, sikap dan perilaku; b) bekerja secara kelompok/ team work; dan c) membangun jejaring social. Masing-masing kemampuan tersebut akan diuraikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan pada pengelola Bank Sampah dan beberapa nasabah Bank Sampah di Kota Gorontalo serta *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bentuk saling menukar informasi antara pengelola Bank sampah, pihak BLH Kota Gorontalo, dan tim peneliti.

A. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku dalam Pengelolaan Sampah

Gerakan memasyakatkan manfaat sampah sudah lama dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Gorontalo. Bentuk gerakan itu melalui media, baik media cetak maupun media elektronik (radio dan televisi) termasuk melakukan gerakan jumat bersih, pengerahan PNS dalam membersihkan: jalan-jalan di pusat kota, tempat-tempat ibadah, pasar sentral dan tempat-tempat lainnya. Upaya itu dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa kebersihan adalah hal utama dan merupakan tanggungjawab semuanya. Ketika daerah di sekeliling dalam keadaan bersih dan bebas sampah, suasana akan memberi kesegaran dan kenikmatan tersendiri bagi warga masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meminimalisir timbulan sampah yang berdampak pada keindahan dan kebersihan kota Gorontalo sebagai ibu Kota Provinsi Gorontalo.

Disadari bahwa Pemerintah Kota Gorontalo memiliki pasukan kebersihan yang setiap hari bekerja membersihkan jalan-jalan dan area-area umum lainnya dan juga dilengkapi kenderaan pengangkut sampah. Tetapi hal tersebut belum mampu menciptakan lingkungan kota Gorontalo benar-benar terhindar dari timbulan sampah yang mengganggu keindahan dan kebersihan kota, juga kesehatan lingkungan dan warga masyarakat. Maka untuk mencari solusi atas permasalahan

tersebut Pemerintah Kota Gorontalo dengan membentuk Bank sampah. Maksud pembentukan Bank Sampah ini agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami manfaatnya, kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari keberadaan bank sampah.

Konsep Bank Sampah sesungguhnya sangat sederhana, tetapi hal merupakan bagian dari program nasional bahkan konsep global dalam konteks penanganan sampah berbasis masyarakat. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh HT Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, bahwa:

> Bank sampah merupakan konsep yang telah lama diperbincangkan secara nasional dan global. Khusus di Kota Gorontalo perbicangannya telah diorientasikan pada pengelolaan sampah model 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)*. Tujuannya untuk membatasi timbulan sampah, memilah dan mendaur ulang. Agar 3R dapat dipahami dan mampu diimplementasikan dan secara perlahan dibentuklah Bank sampah sebagai wadah untuk menampung berbagai jenis sampah yang memiliki nilai ekonomis, disampaing manfaat kebersihan lingkungan dan kesehatan manusia pada umumnya. (wawancara 12 Oktober 2016)

Keberadaan bank sampah merupakan inisiatif awal dari Camat Kota Timur Bapak Junaidi Kiayi Demak (JKD) awal tahun 2012 saat pelaksanaan pendataan warga masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan dan bisa diprediksi memiliki prospek ke depan. Tindak lanjut dari pendataan tersebut, maka "terpetalah" individu dan kelompok-kelompok yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pemberian bantuan usaha berupa modal usaha. Salah satunya modal usaha yang diperuntukkan pembentukan cikal bakal Bank Sampah. Pemberian bantuan modal usaha dimaksudkan untuk merangsang pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber kehidupan termasuk untuk terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebelum terbentuk Bank Sampah, maka pemerintah kecamatan Kota Timur dan kelurahan Moodu melaksanakan sosialisasi ke beberapa kelompok masyarakat seperti: PKK, Dasawisma, sekolah-sekolah. Perjalanan waktu terus berjalan tentang Bank Sampah ini, semangat utama menuju Bank Sampah lebih popular lagi ketika Camat

Kota Timur bapak JKD dilantik menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.

Target BLH terkait sampah ini adalah terus menggelorakan Bank Sampah sebagai upaya merespons target Kota Gorontalo menjadi kota Bebas Sampah tahun 2020. Cara yang dilakukan menjelang tahun 2020 itu adalah BLH Kota Gorontalo melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK) sederajat dan sekolah keagamaan. Selain itu ke ibu-ibu yang tergabung dalam PKK, kelompok Dasawisma, hotel-hotel/ penginapan, rumah makan, dll. Kegiatan sosialisasi tersebut terus dilakukan walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada termasuk personil. Respons sosialiasasi tersebut menurut JKD adalah:

> Gerakan bersih lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan bukan tanggungjawab *cleaning service* yang selama ini dikenal oleh masyarakat yang ada di jalan-jalan di wilayah Gorontalo, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan itu misalnya tidak membuang sampah sembarangan bagi pejalan kaki, pengendara kenderaan motor, pengendera mobil, bentor, dan lain-lain. Perilaku ini merupakan gambaran dari mengurangi timbulan sampah atau dikenal dengan *Rause*. Juga sejak dari rumah berusaha memisahkan mana sampah yang masih bisa dimanfaatkan pada wadah yang terpisah di rumah masing-masing. Wadah itu diharapkan disediakan sendiri oleh masyarakat, kecuali pada tempat-tempat tertentu wadah dengan ukuran sedang dan besar disiapkan oleh pihak BLH sendiri atau pihak sponsor. Hasil pemisahan ini akan berguna bagi masyarakat lainnya yang memanfaatkan sampah itu sebagai sumber kehidupan penopang ekonomi keluarga seperti pemulung/ pengepul sampah. (wawancara tanggal 02 September 2016).

Perkembangan hasil sosialisasi ke sekolah-sekolah tersebut memperoleh respons yang sangat positif dari para kepala, para guru dan seluruh siswa. Bentuk respons tersebut adalah adanya kemajuan dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku tentang "sampah" itu. Respons nyata mereka itu adalah disetiap sekolah sudah ada bank-bank sampah yang tersedia dan telah ada pembagian tugas-tugas pada masing-masing siswa. Bank-bank sampah yang ada itu sudah menjadi nasabah Bank Sampah Mutiara. Pihak sekolah tinggal memberi informasi bahwa sampah siap dijemput. Proses penjemputan sampah tersebut seperti dikemukakan oleh MP adalah:

> Proses penjemputan sampah di sekolah-sekolah dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah melalui telepon. Informasi itu segera ditindaklanjuti dengan langsung menjemputnya dan proses timbang dan bayar diselesaikan pada saat transaksi. Sampah-sampah tersebut sudah terproses atau telah terpilah antara kertas-kertas dan plastik-plastik karena di sekolah-sekolah tersebut telah tersedia wadah yang memisahkannya. Kegiatan penjemputan sampah-sampah itu dilakukan secara rutin 1 minggu sekali jemput atau disesuaikan dengan volume sampah yang ada. (Wawancara, 3 November 2016)

Tersedianya stok sampah di sekolah-sekolah berdasarkan survey karena masing-masing penanggungjawab kelas dalam hal ini ketua kelas sebagai penanggungjawab di lingkungan kelasnya masing-masing. Disamping di sekolah-sekolah tertentu telah ada Wakil Kepala Sekolah bidang Lingkungan, sehingga koordinasi terkait penanganan sampah terjalin dengan baik. Melalui cara ini ternyata lingkungan sekolah/kelas bebas dari sampah, para siswa berlomba meniadakan dengan cara memungut sampah sebesar apapun di sekitar kelas masing-masing.

Strategi lain untuk lebih memberi punguatan pada pengetahuan dan pemahaman tentang sampah dan manfaatnya, maka di sekolah-sekolah diadakan program Adiwiyata. Program ini dimaksudkan untuk menggiatkan sekolah akan peduli kebersihan dan bebas sampah dan memberikan penghargaaan kepada sekolah yang bebas sampah dan lingkungan bersih. Program ini disadari sangat sederhana, tetapi pengaruhnya pada pembentukan watak "pembiasaan" peduli sampah pada lingkungannya dan bisa ditindaklanjuti ketika siswa-siswa itu berada dimana saja dan secara terbiasa peduli sampah. Mindset siswa terhadap peduli sampah terus digalakkan sebagai kiat membangun generasi sadar lingkungan.

Membangun kepedulian sampah selain di sekolah-sekolah juga dilakukan untuk para petugas kebersihan jalan-jalan di wilayah Gorontalo. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap sampah, pemerintah Kota melalui BLH telah melakukan beberapa studi banding ke Jakarta dan Bogor untuk mendalami bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomis. Studi banding itu diarahkan pada para *cleaning service* yang berjumlah ± 295 orang. Hingga pertengahan tahun 2016 *cleaning service* yang telah melakukan studi banding ± 150 orang. Ditargetkan tahun 2017 seluruh *cleaning service* itu semuanya telah melakukan studi banding. Cara ini dilakukan untuk memperkuat pengetahuan, sikap dan perilaku mereka, dan juga sebagai bentuk penghargaan atas kesungguhan mereka dalam menangani sampah.

Studi banding tersebut menurut kepala Badan Lingkungan Hidup JKM diarahkan pada:

> 1) Membangun jejaring social diantara sesama *cleaning service* atau petugas kebersihan untuk tetap menjadikan sampah yang ditangani setiap harinya menjadi sesuatu yang sangat berharga melalui keanggotaan mereka sebagai nasabah bank sampah; 2) Terbangun *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa tanggungjawab) bahwa *cleaning service* memberi kontribusi besar bagi pembangunan Kota Gorontalo khususnya bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan 3) Penghargaan Pemerintah Kota Gorontalo dalam bentuk *Reward* atas pengabdian mereka dalam mengawal kota Gorontalo sehingga memperoleh Adipura sebagai symbol kota bersih. (Wawancara 23 Oktober 2016)

Direktur Bank Sampah Mutiara "MP" mengakui bahwa hasil sosiasalisasi tentang sampah telah merubah pemikiran masyarakat menjadi lebih paham dan peduli akan sampah. Lebih lanjut MP mengatakan bahwa:

> Awalnya sebelum Bank Sampah Mutiara ini terbentuk, pekerjaan saya memang pemulung/pengepul sampah. Pekerjaan ini sudah digeluti cukup lama yaitu sejak tahun 1984. Akhirnya tahun 2014 terbentuklah Bank Sampah Mutiara seperti sekarang ini. Perbedaannya setelah adanya Bank Sampah, sampah-sampah yang masuk telah diproses melalui 3R sehingga proses selanjutnya tidak lagi mengalami kesulitan. Misalnya harus dipisahkan terlebih dahulu mana plastic, kertas, kardus, botol minuman, dan lain-lain. Sampah yang tiba di Bank Sampah tinggal ditimbang dan langsung dibayar ke nasabah, atau sampah-sampah itu dijemput di rumah-rumah, sekolah atau toko-toko atau warung yang telah tersusun rapi dan tinggal ditimbang dan langsung dibayar secara *cash*. (wawancara, 21 September 2016).

Kunci keberhasilan penanganan sampah memerlukan keterlibatan semua pihak. Tetapi untuk saat ini intervensi pemerintah kota Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup masih sangat dominan dalam menggerakkannya. Kemudian disupport oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo melalui sekolah-sekolah di semua tingkatan.

B. Kerja Kelompok/Team Work dalam Pengelolaan Sampah

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak akan sukses jika tidak dilakukan secara kelompok atau *team work*. Berapa banyak suatu usaha/ kegiatan yang dilakukan secara individual mengalami kegagalan, demikian pula dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah mulai dari hulu sampah dengan hilir harus disadari melibatkan berbagai pelaku/ orang-orang yang terlibat dan serius dalam melakoninya. Pada bagian awal tulisan yang menguraikan tentang pentingnya pengetahuan, sikap dan perilaku tentang sampah banyak melibatkan unsur di dalamnya. Sebagai contoh, Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo tidak mungkin berhasil mengkampanyekan manfaat sampah dari berbagai aspek jika tidak melibatkan semua elemen dalam masyarakat dan seterusnya tidak direspons oleh masyarakat. Semua elemen masyarakat itu juga harus secara bersama-sama mensuport apa yang menjadi target Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolan sampah. Artinya semua unsur saling terlibat, atau dengan kata lain ada simbiosis mutuliasme di dalamnya menjadi suatu kebutuhan yang saling terkait.

Simbiosis mutualisme dimaksud pada pengelolaan sampah pada kenyataannya dimulai dari unsur pemerintah khususnya Pemerintah Kota Gorontalo terlebih dahulu. Selanjutya Pemerintah Daerah Gorontalo menindaklanjuti melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan pemetaan peluang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kota Gorontalo secara bertahap. Pemetaan itu merupakan cara untuk memperoleh data para pelaku yang diharapkan mampu menggerakkan Bank Sampah sehingga konsep Bank Sampah akan memberi manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat secara luas, disamping dampaknya bagi lingkungan yang bersih dan sehat. Proses menggerakkan para pelaku Bank Sampah perlu pendekatan yang komprehensif, humanistic dan social budaya.

Para pelaku Bank Sampah (Mutiara) masih difasilitasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal penyediaan Tempat Pengolahan Sampah TPS 3R (Ruduce, Reuse, Recycle) yang berlokasi di Kelurahan Moodu RT I/ RW III. Tempat merupakan tempat yang luas dan difasilitas oleh peralatan yang mengolah sampah

secara R3 tersebut. Menurut penjelasan HT Kepala Bidang Pengelolaan Limbah terkait dengan tempat dimaksud adalah:

> Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah langsung di tangani oleh Pemerintah Kota dikarenakan tempat yang khusus dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah tempatnya tidak memenuhi syarat. Sementara yang mengelola Bank Sampah dipercayakan kepada Bapak MP sebagai pimpinannya untuk mengelola mulai saat masuk sampah, penimbangan dan proses pengiriman sampai ke Surabaya. Kendalanya adalah lokasi Bank sampah Mutiara yang sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk dan tempat penampungan sangat kecil, sehingga perlu perhatian khusus. (Wawancara, 12 Oktober 2016)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh MP sebagai Direktur Pelaksana Bank Sampah Mutiara, bahwa:

> Volume sampah yang masuk ke Bank Sampah Mutiara terus mengalami kenaikan, saat ini sampah yang masuk telah mencapai 3 ton/ perhari dan dimaksimalkan sampah yang keluar atau diteruskan pada proses pengepakan mencapai jumlah yang sama. Kendalanya adalah tempat penampungan sudah sangat sempit. Mencermati keterbatasan tempat tersebut Pemerintah Kota membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dengan luas yang cukup memadai untuk tempat penampungan, pemilahan, dan pengepakan. Tempat tersebut juga memungkinkan pengelolaan sampah lebih baik dalam menata tenaga kerja, system administrasi keuangannya (akuntansi) dan keamanan sampah-sampah yang ada. Keamanan dimaksud terutama bebas dari ancaman guyuran hujan dan genangan air karena tertutup dan juga terhindar dari bahaya kebakaran. (Wawancara, 21 September 2016).

Geliat para nasabah bank sampah semakin menyebar ke berbagai tempat dalam melakukan pengumpulan sampah, tetapi geliat tersebut belum dilakukan secara bersama. Ada baiknya juga masyarakat secara mandiri telah memisahkan mana sampah yang kering dan basah, kertas atau plastic atau organic atau anorganik pada wadah yang ada. Sampah di rumah-rumah penduduk kondisinya masih bercampur baur sehingga menyulitkan petugas kebersihan untuk melakukan reuse/pemilahan. Umumnya sampah yang bercampur baur tersebut berasal dari warga masyarakat dengan status social menengah ke atas. Hal tersebut seperti

dijelaskan oleh pengumpul sampah yang memiliki semangat mengolah sampah menjadi sumber kehidupan yakni Bapak KD sebagai berikut:

> Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas atau masyarakat yang mempunyai rumah-rumah bagus umumnya dicampur adukkan antara sampah-sampah kering dan basah, plastic dan kertas, dan lain-lain. Padahal kalau itu dilakukan, maka nilai sampah mereka itu masih kami bisa nikmati untuk dibawa ke bank sampah dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya ada dos-dos atau kertas-kertas bekas makanan yang sudah dicampur aduk dan kondisinya basah/rusak, maka dengan sendirinya ketika dibawa ke bank sampah sebagian besar dinilai dengan harga sangat rendah bahkan ditolak. Oleh karena itu ada baiknya sampah-sampah itu dipilah, bagi mereka penghasil sampah-sampah mungkin mereka menilai sampah itu tak bernilai secara ekonomi, tetapi bagi masyarakat kecil sampah-sampah itu sangat bernilai sebagai rezeki dari Allah SWT. (Wawancara, 3 November 2016)

Kebijakan pengelolaan sampah model 3R yang dimotori oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada kenyataannya telah memberi ruang pada masyarakat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber kehidupan. Sebelum kebijakan pengelolaan sampah 3R digalakkan antusias masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan belum melirik tentang smpah tersebut. Perbandingannya adalah sebelum adanya kebijakan tentang pengelolaan sampah dan keberadaan Bank Sampah Mutiara sangat kelihatan timbulan sampah di hampir semua ruas jalan dan diberbagai sudut pemukiman penduduk. Saat ini timbulan sampah semakin sedikit atau berkurang dan hanya sampah-sampah yang tidak bisa diolah lagi yang terlihat.

Diakui oleh Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup seperti yang dikemukakan oleh HT:

> Keberadaan Bank Sampah telah memberi pemahaman yang luas pada seluruh elemen masyarakat. Secara perlahan kerjasama diantara para nasabah Bank Sampah semakin terbuka luas dan saling menguatkan satu dengan lainnya walaupun belum merata pada seluruh masyarakat dan wilayah di Kota Gorontalo. Semangat untuk membentuk kelompok-kelompok nasabah Bank Sampah terus berjalan seiring dengan kemudahan pihak pengelola Bank Sampah melakukan penjemputan sampah-sampah yang telah dipilah secara rapi. (wawancara, 12 Oktober 2016)

Dalam kaitannya dengan proses penjemputan langsung sampah-sampah pada nasabah Bank Sampah menurut MP adalah:

> Karena semakin bertambahnya nasabah Bank Sampah yang diikuti dengan bertambahnya volume sampah, maka pihak pengelola Bank sampah merasa tertantang. Tantangan itu berarti harus bergerak cepat merespons informasi dari nasabah sampah untuk segera dijemput dan langsung dibayar cash. Cara seperti ini merupakan gambaran adanya kerjasama yang baik antara pengelola Bank Sampah dengan nasabah Bank sampah. Disamping itu para nasabah sangat antusias melakukan pengolahan sampah karena tidak terjadi penumpukan sampah dan langsung dibayar secara cash oleh pengelola Bank Sampah. Keuntungan Bank Sampah adalah target 3 ton/ hari secara perlahan dapat dipenuhi, tetapi kendalanya pada kesiapan modal. Setiap hari Bank Sampah harus menyiapkan modal usaha sekitar Rp. 2 jutaan/hari. Modal itu belum termasuk biaya operasional kenderaan dan tenaga kerja dan hal-hal lainnya. Tetapi bisnis sampah seperti ini sangat menjanjikan, baik dari aspek ekonomi, juga aspek kebersihan dan keindahan Kota Gorontalo. (Wawancara, 3 November 2016)

Keberhasilan dalam penanganan sampah membutuhkan kerjasama dan keseriusan seluruh pihak. Pemerintah Kota Gorontalo sebagai motor penggerak masyarakat dalam pengelolaan sampah harus serius dan terus melakukan pemantauan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan dan segera memberi solusinya.

C. Membangun Jejaring Social/Relasi dalam Pengelolaan Sampah

Sampah bukan urusan yang harus diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi urusan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Sampah dipandang sebagai sesuatu yang sepele akibatnya sampah yang menjadi sumber musibah dan kesengsaraan. Sampah tidak dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dan memberi berkah kehidupan dan tidak ditangani secara baik dan tuntas. Dampaknya sampah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Banyak pelajaran yang nyata ketika manusia lalai memperlakukan sampah yang dihasilkannya sendiri dan tidak diurus dengan cara-cara yang bijak. Oleh karena itu penanganan sampah membutuhkan satu

konektivitas yang saling menguatkan bagaikan system yang terdiri dari sub-sub system.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa penanganan sampah tdaik mesti didominasi oleh pemerintah semata tetapi menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat. Antara pemerintah, pemilik modal dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam menuntaskan sampah, baik sampah yang masih dapat didaur ulang melalui proses 3R maupun sampah yang tidak dapat diolah lagi dan harus dibuang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). TPA pun harus memenuhi syarat agar tidak menjadi ancaman bagi lingkungan sekitarnya. Demikian seterusnya proses pengolahan sampah tiada hentinya untuk dicarikan solusinya. Suatu waktu eksistensi TPA akan terancam daya tampungnya karena over kapasitas, oleh karena itu proses sampah melalui 3R menjadi solusinya.

Membangun jejaring social dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sampah perlu intervensi pemerintah Kota Gorontalo untuk membuka ruang dalam memediasi berbagai unsur (perorangan, lembaga atau Bank) di daerah untuk memfasilitasi baik dari aspek permodalan maupun fasilitas tempat penampungan yang refresentatif, mesin pengolahan sampah, dan tenaga kerja terlatih (tenaga akuntan). Khusus untuk tenaga buruh/pekerja pengolah di Bank Sampah adalah tanggungjawab pengelola Bank Sampah sendiri.

Upaya Pemerintah Kota Gorontalo menggandeng keterlibatan Bank Sulut Cabang Gorontalo dalam memberikan bantuan modal pada Bank Sampah Mutiara dijelaskan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup JKD sebagai berikut:

> Cara yang mudah agar Bank Sampah Mutiara memperoleh bantuan modal dilakukan dengan mengangkat Ketua Dharma Wanita Gorontalo sebagai Pimpinan Bank Sampah Mutiara yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, selanjutnya Bank Sulut Cabang Gorontalo sebagai PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra dan sepakat secara bersama menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam pengelolaan sampah. Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa PIHAK PERTAMA berfungsi sebagai tempat menerima dan menampung sampah masyarakat kemudian ditimbang dan dinilai dengan uang yang akan dicatat dalam buku rekening nasabah. Bank Sulut Cabang Gorontalo sebagai

> PIHAK KEDUA berfungsi sebagai tempat menerima, mengelola menyimpan dana dari nasabah Bank sampah yang berasal dari hasil penjualan sampah. Inilah gambaran bahwa dalam pengelolaan sampah perlu membangun jejaring yang baik atau relasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah. Tidak ada pihak pemberi modal manapun kalau tidak ada agunan sebagai jaminan ketika Bank memberikan bantuan modal usaha. Itulah gambaran keseriusan pemerintah kota Gorontalo untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki kesungguhan dan semangat berusaha. (wawancara, 23 Oktober 2016)

Memperoleh modal usaha adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi masyarakat yang tidak memiliki asset sebagai barang jaminan jika tidak ada pihak-pihak yang memfasilitasinya. Itulah tugas utama pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya agar bisa produktif. Ikutannya adalah program kebersihan dan keindahan kota berjalan dengan baik juga usaha mengurangi jumlah pengangguran terlaksana secara bersamaan. Tetapi perlu pendampingan secara terus menerus dan proses control yang ketat. Disamping juga ada pemberian sanksi bagi mereka yang tidak memanfaatkan program pemberdayaan sebagai proses pembelajaran. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pandangan HT Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo adalah:

> Pemberdayaan harus dilakukan secara selektif dan terkontrol. Sebelumnya pemberdayaan secara individual diarahkan dalam bentuk pemberdayaan kelompok. Pemberdayaan kelompok mudah melakukan control, sebab diantara kelompok sudah ada ketua, sekretaris dan anggota kelompoknya, kemudahannya adalah diantara mereka sudah ada saling control satu sama lainnya. Jalinan komunikasi saat ini sangat mudah dilakukan, misalnya melalui Handphone, demikian juga ketika kelompok-kelompok itu diundang untuk bertemu melakukan sosialisasi atau pemberian informasi terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah sangat mudah dilakukan, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. (wawancara, 12 Oktober 2016)

Selain kerjasama dengan Bank Sulut Cabang Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo c.q Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo membuka ruang kerjasama dengan Inspektorat Kota Gorontalo dalam bentuk Nota Kerjasama

dengan Bank Sampah Mutiara tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku selama 2 tahun (hingga tahun 2017). Substansi kerjasama antara Inspektorat Kota Gorontalo dengan Pengelola Bank Sampah Mutiara menurut JKD adalah:

> Kerjasama antara pihak Inspektorat Kota Gorontalo dan pihak Pengelola Bank Sampah dilakukan sebagai strategi memberdayakan para pihak, yaitu pihak Inspektorat dalam hal ini ada pegawainya terkena Tuntutan Ganti Rugi atas pekerjaan yang dilakukannya, maka pegawai tersebut dalam melakukan pembayaran TGR dilakukan cara menyetorkan sampah ke Bank Sampah Mutiara dengan persyaratan dan prosedur yang telah disepakati bersama. Nota kesepahaman ini adalah gambaran bentuk rangsangan Pemerintah Kota Gorontalo c.q Badan Lingkungan Hidup pada Bank Sampah Mutiara untuk lebih proaktif dan produktif dalam menangani sampah. Selin itu Pemerintah Kota Gorontalo memberi perhatian serius pada Bank Sampah Mutiara dengan menyiapkan satu bangunan khusus untuk pengelolaan sampah melalui proses 3R yang beralamat di Kelurahan Moodu Kota Timur dengan bangunan yang cukup refresentatif. Bangunan itu dianggap cukup untuk menampung, mengelola, dan melakukan pengepakan hingga proses pengiriman ke pihak pengusaha dengan jumlah yang cukup besar seperti ke Suabaya dan atau ke kota lainnya. (Wawancara 23 Oktober 2016).

Menciptakan jejaring social atau kerjasama dalam pengelolaan sampah harus dilakukan lintas sector. Pemerintah Kota Gorontalo c.q Badan Lingkungan Hidup yang memiliki legalitas formal dalam penanganan sampah di wilayah Kota Gorontalo yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Ancaman didepan mata, jika sampah tidak dikelola dengan professional dan berbasis masyarakat. Ketegasan, komitmen, dan konsistensi Pemerintah Kota Gorontalo sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah dan dilakukan secara kontinu.

Berdasarkan uraian tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah paparkan berdasarkan data dan hasil wawancara pada beberapa informan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Strategi pemberdayaan yang diungkap dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pengelolaan sampah; aspek kerja kelompok/ team work dalam pengelolaan sampah; dan aspek membangun jejaring social atau relasi dalam pengelolaan sampah

melalui konsep 3R *(Reduce, Reuse, and Recycle)*. Ketiga aspek hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bagian berikutnya.

5.4 Pembahasan

Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sampah telah dimulai sejak tahun 2008 ketika lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Bertambahnya jumlah penduduk akan membawa dampah pada peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari bertambahnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan, dan jika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam UU tersebut disoroti bahwa pengelolaan sampah selama ini belum dikelola dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah daerah dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki termasuk dalam menangani masalah persampahan telah melakukan kebijakan, salah satunya membentuk Bank Sampah yang diharapkan mampu menyelesaikan timbulan sampah di daerahnya. Kehadiran Bank sampah sebagai solusi yang terbaik dalam mengolah sampah dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kesehatan manusia dan lingkungan. Kehadiran Bank Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menurut Kristina (2014: 19-20) Bank sampah ini merupakan langkah awal yang baik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai sesuatu yang mempunyai guna dan manfaat. Langkah pemberdayaan itu harus dijaga oleh stakeholder yang menangani hal tersebut. Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dikontrol secara ketat agar masyarakat terberdayakan dengan baik, sehingga mereka memahami apa maksud dan tujuan dari pemberdayaan tersebut. Hal yang harus dihindari oleh stakeholder dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo sebagai perpanjangan tangan

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo adalah jangan sampah pemberdayaan dimaknai sebagai tugas pemerintah dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat tanpa ada sesuatu perubahan yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti diuraikan pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 2 point g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu alternative yang dianggap strategis melalui pembentukan Bank Sampah untuk mengelola sampah agar bernilai secara ekonomis. Pembentukan Bank sampah ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya timbulan sampah yang ada di Kota Gorontalo mencapai ± 480,08 M^3/hari. Target Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Lingkungan Hidup mentargetkan terbentuknya Bank Sampah tahun 2016 berjumlah 4 Bank Sampah, yakni: Sipatana, Pulubala, Wonggaditi dan Moodu. Tetapi hingga saat ini Bank Sampah yang eksis adalah Bank sampah yang berada di Moodu Kecamatan Kota Timur, yakni Bank Sampah Mutiara. Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang telah dilakukan ditemukan berbagai masalah yang dihadapi sehingga Bank Sampah dibeberapa lokasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal.

Bila memperhatikan timbulan sampah yang cukup besar yakni ± 480,08 M^3/hari (Tabel 2) yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah Kota Gorontalo berarti volume sampah sangat tinggi. Jumlah tersebut menjadi peluang yang sangat baik untuk dikelola oleh Bank-Bank sampah yang telah dibentuk. Tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal karena 4 (empat) Bank sampah yang dibentuk hanya Bank Sampah di Kecamatan Kota Timur yang beroperasi dengan baik, yakni Bank Sampah Mutiara. Sedangkan Bank Sampah di Kecamatan: Sipatana, Wonggaditi dan Pulubula tidak beroperasi sama sekali. Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan pihak BLH karena pengelola Bank-Bank Sampah itu tidak serius menanganinya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh pengelola Bank sampah dan juga kurangnya pasokan dari nasabah atau para pengepul/pemulung di lapangan.

Lain halnya dengan Bank Sampah yang ada di Kota Timur khususnya di Kelurahan Moodu. Bank Sampah ini cukup progresif sehingga terjadi interaksi yang baik antara pengelola Bank Sampah dengan para nsabah Bank Sampah di wilayah tersebut. Pengelolaan Bank Sampah memerlukan keseriusan yang ditopang oleh kemampuan, pengetahuan, kemampuan ekonomi (mampu mengelola keuangan), kebiasaan untuk terus berusaha dan bekerja keras, dan factor lingkungan yang memungkinkan eksisnya Bank Sampah termasuk mampu menciptakan kerja team yang solid. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Mohamad, dkk (2012: 695) bahwa dalam pengelolaan sampah baik oleh masyarakat secara individu maupun secara terorganisir seperti Bank Sampah pada umumnya dipengaruhi beberapa factor, yaitu: pengetahuan, kebiasaan, geografis dan ekonomi. Factor-faktor ini sangat terkait satu dengan lainnya, oleh karena itu ketika memberdayakan masyarakat tentang pengelolaan sampah maka factor-faktor harus menjadi prioritas dalam materi pemberdayaan.

A. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku dalam Pengelolaan Sampah

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini BLH dalam pengelolaan sampah secara bertahap telah merubah mindset masyarakat tentang teknis pengelolaan sampah melalui konsep 3R. Sampah yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat secara perlahan pemahaman itu mulai berubah. Perubahan itu terlihat dari mulai tumbuh para pengepul sampah yang secara teroraganisir dalam bentuk nasabah-nasabah bank sampah, khususnya yang ada di Kecamatan Timur Kota Gorontalo. Istilah nasabah ini digunakan sebagai bentuk penghargaan atas keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nasabah itu selanjutnya menyetorkan sampah ke Bank Sampah dalam hal ini Bank Sampah Mutiara secara periodic, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Jika memperhatikan volume timbulan sampah yang dihasilkan di masing-masing kecamatan 9 (sembilan) terlihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah pendudukn yang terbesar merupakan daerah penghasil timbulan sampah terbesar.

Kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan Kota Tengah dengan jumlah penduduk 26,698 jiwa dan hasil timbulan sampah mencapai 66,7M^3/hari (Tabel 2). Dari timbulan sampah tersebut yang terproses melalui 3R hanya mencapai 20,2 M^3/hari atau sekitar 30% dari total sampah yang dihasilkan, sisanya sekitar 73,0% diangkut ke ke TPA. Sementara sampah yang tidak terproses atau yang tidak terangkut ke TPA 8,7M^3/hari atau 5,8%. Jika dirata-ratakan sampah yang terproses melalui 3R hanya sekitar 21% dari total sampah (480,08M^3/hari) yang dihasilkan penduduk di 9 (Sembilan) kecamatan di wilayah Kota Gorontalo.

Kalau melihat timbulan yang terproses lewat 3R hanya sekitar 21% dari total sampah yang ada, berarti sebagian besar sampah belum diolah. Sampah dimaksud dari jenis sampah organic dan anorganik. Sampah organic meliputi: kulit buah, kertas, kayu, ranting, daun dan sisa makanan. Sampah ini yang berasal dari alam (hewan dan tumbuhan), sampah ini dapat terurai secara alami dengan cepat. Sedangkan sampah anorganik meliputi: kaleng, plastic, logam, kaca, karet dan strerofoam. Sampah yang berasal dari manusia dan buatan manusia tidak bisa terurai secara alami. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sampah-sampah yang terproses melalui 3R yang dikelola oleh Bank Sampah Mutiara masih didominasi oleh sampah-sampah anorganik. Untuk sampah organic khususnya sisa-sisa makanan (dominan sampah rumah tangga dan rumah makan) dan kulit buah, kayu, ranting dan daun belum menjadi focus perhatian nasabah bank sampah juga pengelola Bank Sampah. Padahal sampah-sampah tersebut dapat diolah menjadi pupuk organic. Hal tersebut disebabkan peralatan untuk mengolah sampah-sampah tersebut belum tersedia di Kota Gorontalo.

BLH kota Gorontalo mengakui bahwa penanganan sampah masih menjadi urusan pemerintah Kota Gorontalo. Pihak swasta belum banyak berperan, khususnya dalam memodali bank sampah dalam mengolah sampah yang dihasilkan masyarakat. Pihak Bank Sampah dalam hal ini Bank Sampah Mutiara yang merupakan satu-satunya Bank Sampah yang berkembang setelah dibentuk pada tahun 2015 yang lalu. Kiprah bank sampah ini telah memperlihatkan kemajuan yang berarti, sehingga Pemerintah Kota Gorontalo memfasilitasnya dengan membangu

Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep 3R yang berlokasi di Kelurahan Moodu Kota Timur. Tempat ini cukup refresentatif dari segi lokasinya, akses masuk, peralatan yang disiapkan dan memberi kesempatan kerja bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan. Di Kota Gorontalo terdapat satu tempat yang menerima atau menampung sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat dengan kategori sampah hasil pilahan seperti dos-dos bekas, botol-botol plastic, kaleng minuman, logam, besi bekas dll yang beralamat di Kelurahan Liluwo Kota Tengah Belakang Kampus UNG yang dikenal luas oleh masyarakat "Mas Joko". Tempatnya sangat luas tentunya modal yang dubutuhkan juga sangat besar.

Semangat menggelorakan mengembangkan bank sampah suatu keharusan bagi pemerintah kota Gorontalo khususnya BLH. Usaha yang telah dilakukan mensosialisasikan Bank Sampah kepada seluruh lapisan masyarakat terus dilanjutkan. Dampak dari sosialisasi itu sudah merubah wajah kota Gorontalo pada dibandingkan beberapa tahun lalu. Perubahan itu semakin berkurangnya timbulan sampah seperti wadah-wadah bekas minuman baik plastic maupun kaleng, kertas dan lain-lain. Kecenderungan orang-orang yang mencari rezeki khususnya kehadiran pemulung sudah sangat membantu mengurangi timbulan sampah tersebut. Oleh karena itu BLH kota Gorontalo harus memikirkan penambahan wadah penampungan sampah-sampah dibeberapa tempat yang sangat strategis dengan tetap mengedepankan estetika dari wadah sampah tersebut.

Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam menangani sampah dapat dilihat dari beberapa hal: *pertama:* masyarakat menyediakan sendiri wadah sampah ruamh tangga yang dihasilkan baik sampah organic dan anorganik, sampah basah atau kering; *kedua:* membuang sampah ke Tempat Penampungan Sampah (TPS) secara benar dan telah terpisah sesuai jenis sampah; *ketiga:* menggerakkan para tetangga di lingkungannya menyiapkan wadah sampah sendiri di rumahnya masing-masing; dan *keempat:* mensuport para pemulung/pengepul sampah yang belum terorganisir agar ikut menjadi nasabah bank sampah yang di kelurahan atau kecamatan yang telah dibentuk oleh BLH. Khusus point keempat tersebut sebagai

upaya mensuport agar nasabah bank sampah terus berkembang sehingga berdampak pada aspek ekonomi, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Keempat perilaku tersebut merupakan gambaran bahwa pengolahan sampah adalah tanggungjawab semua masyarakat. Pemerintah hanya sebatas penyedia layanan, masyarakatlah yang harus berperan aktif. Jika semua ditangani pemerintah, bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan hanya khusus pengolahan sampah. Biaya itu meliputi pengadaan kenderaan dan maintenance, tenaga kerja pengangkut sampah, petugas kebersihan/cleaning service, wadah penampungan sampah dalam skala besar, sedang maupun ukuran kecil. Dalam kaitan perilaku pengelolaan sampah menurut Suparmoko (dalam, Darmawan: 2014) menegaskan bahwa jika dalam pengolahan sampah di perkotaan tidak melibatkan masyarakat maka tugas pemerintah justru semakin berat, pemerintah hanya sekedar penyedia layanan semata. Dan jika pengolahan sampah tidak dilakukan secara sinergitas akan berdampak pada kesehatan manusia, kondisi ekonomi, dan tingginya biaya pengelolaan atau perbaikan lingkungan dan infrastruktur atau menimbulkan biaya eksternalitas.

Mengurangi permasalahan yang akan timbul dari pengolahan sampah yang tidak sistematis dan tidak terencana dengan baik, maka strategi menggiatkan bank-bank sampah harus diperbaharui dari asepek: 1) model rekrutmen harus mampu menjaring individu yang memiliki motivasi dan jiwa enterprenaur serta jiwa bekerja secara kelompok/team ; 2) model pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan pengelola bank sampah dan refresentasi dari para nasabah bank sampah yang berhasil sebagai sumber inspirasi calon nasabah sampah agar termotivasi; dan 3) pemetaan lokasi sumber sampah potensial yang memiliki nilai ekonomi. Strategi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan pelaku-pelaku sampah yang menginginkan kehidupannya lebih dari hari ini. Pelaku-pelaku yang tidak perlu modal uang yang besar, tetapi modal semangat dan mimpi yang besar memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan staretgi yang dikemukakan tersebut, maka antara pelaku Bank Sampah Mutiara, BLH, nasabah sampah, Bank Sulut Cabang Gorontalo yang telah memberi peluang modal usaha persampahan, dan unsur perguruan tinggi/ peneliti melakukan diaolog secara terbuka yang dapat diakses secara live oleh masyarakat luas. Dialog itu misalnya melalui radio RRI atau radio swasta yang di wilayah Kota Gorontalo sebagai ajang untuk membebaskan sampah di kota Gorontalo secara khususnya dan provinsi Gorontalo pada umumnya. Masyarakat juga bisa memperoleh informasi bahwa Kota Gorontalo berambisi menjadi Kota bersih / bebas sampah tahun 2018 mendahului target nasional "Indonesia bebas sampah 2020". Melalui forum dialog itu secara bertahap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat akan terbuka akan manfaat sampah dan memulainya dari lingkungannya sendiri, tempat kerja dan daerahnya secara keseluruhan.

B. Kerja Kelompok/ Team Work dalam Pengelolaan Sampah

Keberhasilan pengelolaan sampah akan dapat dicapai jika ditunjang oleh Bank-Bank sampah yang dikelola secara professional. Bank-bank sampah dimaksud harus mampu menciptakan team kerja yang solid dan terkoordinir dengan baik. Kerja kelompok/ Team kerja dimaksud terdiri dari: Team dari BLH, pengelola Bank sampah, para nasabah bank sampah, pihak Bank atau pemodal usaha persampahan, clening service, petugas pengangkut sampah dan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan. Team ini harus saling support dengan satu sasaran "Kota Gorontalo bebas Sampah 2018". Ikutannya adalah para pelaku sampah akan merasakan manfaat dari aspek ekonomi, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kerja kelompok/ Team kerja harus ditopang oleh legalitas formal seperti Keputusan Walikota/ Peraturan Walikota atau dalam Peraturan Daerah (Perda). Legalitas formal itu diperlukan agar penguatan bank-bank sampah yang dibentuk dapat disuport dengan anggaran yang terencana dan masuk dalam APBD untuk setiap tahunnya. Hal ini diperlukan agar perkembangan keberadaan bank sampah

dapat diukur keberhasilannya dan atau kegagalan bank sampah dapat dikoreksi atau disesuaikan hal-hal dianggap menghambat. Hal-hal yang menghambat misalnya fasilitas yang mendukung berjalannya operasional bank sampah seperti tempat penampungan sampah sementara yang telah diproses melalui 3R, tenaga kerja di bank sampah yang menerima dan meneruskan sampah ke tempat pengepakan dan proses pengiriman, penyuplai sampah dalam hal ini para nasabah bank sampah, serta kenderaan operasional.

Intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah bagaimana membuat team kerja atau kelompok kerja yang mampu mengeolah sampah secara baik melalui bank sampah. Sebagai contoh Bank Sampah Mutiara yang dikelola oleh MP telah berkembang dengan baik, karena mampu menciptakan team kerja yang baik dan hasilnya saat ini cukup menggembirakan. Hasil itu seperti peningkatan pendapatan Bank sampah perhari bisa mencapai ± Rp. 600.000/hari. Pendapatan yang sangat besar dalam perspektif usaha sebagai pengelola sampah, dan ini merupakan bentuk rangsangan bagi siapa yang ingin bergelut dibidang persampahan. Usaha persampahan selama ini dianggap suatu usaha yang menjijikkan, kotor, bau atau busuk, merusak kesehatan dan lain-lain. Pemahaman itu adalah gambaran atas pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang rendah, sehingga sikap dan perilaku terhadap sampah dan para pelaku pengelola sampah dianggap suatu pekerjaan rendahan.

Kemajuan pengetahuan tentang pengelolaan sampah saat ini telah membawa berubah. Para nasabah bank sampah yang menjadi nasabah Bank Sampah Mutiara di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur saat ini cukup merasakan manfaatnya. Betapa tidak volume timbulan sampah yang berserakan seperti wadah bekas minuman (plastic atau kaleng), kertas, dos-dos bekas dan lain-lain yang masih bernilai ekonomis semakin kurang dilihat. Motivasi nasabah bank merasa jika sampah-sampah yang bernilai ekonomis itu dibiarkan saja, maka rezeki akan semakin menjauh. Kondisi ini adalah gambaran bahwa sampah harus dikelola secara bersama, bekerja secara bersama dan harus team kerja yang ada harus solid, sehingga sinyalemen yang dikemukakan oleh Darmawan (2014: 177) yang

mengidentifikasi permasalahan sampah tidak akan terjadi lagi. Sinyalemen itu antara lain seperti: masih banyaknya volume timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat, masyarakat belum berperan aktif memanfaatkan sampah, dan masih banyaknya sampah di selokan atau saluran air pada kenyataannya semakin berkurang dibandingkan dengan belum adanya bank sampah yang beroperasi. Tetapi point lain yang disoroti Darmawan tersebut seperti masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pemisahan sampah organic dan anorganik melalui wadah tertentu, sampah masih bercampur aduk.

Harus diakui permasalahan sampah seperti yang digambarkan tersebut secara bertahap sudah dapat diatasi dengan baik sambal mencari solusi atas permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu benar apa yang dikemukakan Kristina, 2014: 20) bahwa harus dibangun suatu system pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, baik dilihat dari kuantitas, kualitas dan waktu sehingga target pengelolaan sampah yang menguntungkan dari berbagai aspek dari tercapai. Posisi BLH dalam konteks ini sangat menentukan, walaupun pada kenyataannya anggaran untuk penanganan sampah pada tahun 2016 ini sangat minim. Pembiayaan pengelolaan sampah perlu dipertimbangkan dinaikkan agar semua sector yang mendorong pengelolaan sampah bisa dibiayai, khususnya menyangkut fasilitas yang sifatnya operasional.

C. Membangun Jejaring Sosial/ Relasi dalam Pengelolaan Sampah

Keterlibatan salah satu Bank Pemerintah yaitu Bangk Sulut Cabang Gorontalo merupakan kepedulian lembaga pemerintah dalam membantu masyarakat melalui lembaga Bank Sampah Mutiara yang dikelola secara bersama antara pemerintah Kota Gorontalo dengan masyarakat patut diapresiasi. Betapa tidak jika suatu Bank memberi modal usaha, maka yang diberi modal atau pinjaman harus memiliki barang jaminan atau agunan sebagai persyaratan utama. Tetapi dengan bantuan dan fasilitas dari BLH mewakili pemerintah Kota Gorontalo hal itu dapat diwujudkan. Pemberian bantuan dapat dilakukan, dan kenyatannya adalah adanya MoU antara Bank Sampah Mutiara dengan Bank Sulut Cabang Gorontalo. MoU tersebut secara subtantif memberi ruang kepada bank Sampah Mutiara

melalui para nasabahnya dapat mengelola dan menyimpan dana hasil penjualan sampah dan memberikan bantuan modal usaha pada nasabah sampah yang ingin mengembangkan usahanya.

Selain itu kemudahan yang diperoleh Bank Sampah Mutiara melalui kerja sama dengan pihak Inspektorat Kota Gorontalo yang difasilitas BLH adalah bagi PNS yang harus membayar Tutuntan Ganti Rugi (TGR). PNS dapat membayar TGR dengan cara menyetorkan sampah-sampah produktif ke Bank Sampah Mutiara dan selanjutnya dihitung sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak Bank Sampah Mutiara harus bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul jika hal-hal yang disepakati antara keduanya tidak dapat dipenuhi oleh pengelola Bank Sampah Mutiara. Wujud kerjasama ini merupakan gambaran bahwa dalam pengelolaan sampah membutuhkan relasi atau harus dibangun jejaring social yang saling mengikat dan menguntungkan para pihak yang mengadakan perjanjian. Keuntungannya adalah masing-masing pihak saling bertanggungjawab sesuai point-point kesepakatan yang dibuat. Artinya jika suatu jalinan kerjasama tidak dilakukan perjanjian kerjasama dan sanksi yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak, biasanya perjanjian itu berlaku begitu saja dan tanpa memberi dampak kemanfaatannya pada masing-masing pihak.

Pelibatan secara aktif masyarakat yang diberdayakan harus dilakukan secara ketat dan selektif, sebab kalau tidak dilakukan seperti itu masyarakat menganggapnya pemberian bantuan merupakan tanggungjawab pemerintah. Berikutnya pemberdayaan sudah saatnya dilakukan secara berkelompok sehingga mudah dikontrol dan disertai dengan perjanjian dalam bentuk MoU yang sangat ketat. Hak dan kewajiban para pihak yang dicantumkan secara jelas dan ditandatangni si atas meterei. Bentuk penguatan seperti itu akan mengikat baik secara emosional maupun tanggungjawab secara kelompok. Hal itu yang ditekankan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Limbah BLH Kota Gorontalo (HT) seperti yang telah diulas pada bab hasil penelitian sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat yang diikuti dengan pemberian bantuan harus dilakukan secara selektif dan terkontrol. Kegagalan selama ini dalam kegiatan pemberdayaan

tidak dilakukan melalui tahapan yang ketat dan terkontrol. Akibatnya kelompok-kelompok masyarakat yang diberdayakan dan diberi modal usaha mengalami kegagalan. Lain halnya dengan Bank Sampah Mutiara yang dilakukan secara selektif dan terkontrol hasilnya sangat menggembirakan seperti yang sekarang ini. Dampaknya bagi pemerintah berarti upaya pemberdayaan terlihat keberhasilannya, dan disisi masyarakat yang diberdayakan ada perubahan yang signifikan khususnya bagi kesejahteraan hidup keluarga mereka.

Pengembangan pengelolaan sampah di masa mendatang akan terus digalakkan dengan cara mencari pelaku-pelaku yang serius dalam mengelola sampah melalui lembaga seperti Bank Sampah Mutiara yang saat ini berhasil. Disadari bahwa mencari pelaku seperti yang diharapkan terasa sulit, tetapi berkaca dari keberhasilan pengelola Bank Sampah Mutiara mudah-mudahan akan menjadi acuan bagi yang lainnya mau dan mampu melakukan hal yang sama. Inilah tantangan dalam memberdayakan masyarakat merubah pengetahuan, sikap dan perilaku mereka dan bagaimana mencipatakn jaringan kerjasama yang saling menguatkan dan menguntungkan. Orientasi pemerintah adalah aspek social kemasyarakatan ada dampaknya, serta target pemerintah Gorontalo menjadi kota Bersih Bebas Sampah 2018 mendahului nasional target menjadi kenyataan. Tentunya capaian itu memerlukan komitmen bersama yang saling bersinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Itulah gambaran dari *Good Governance* yang menjadi tujuan dalam pengelolaan negara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dianggap urgen sebagai hasil temuan penelitian untuk dipertimbangkan dalam memaksimalkan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Hal-hal yang urgen tersebut adalah: 1) wadah penampungan sampah (kering basah / organic unorganik) masih sangat terbatas sehingga perlu diperbanyak, khususnya ditempat-tempat yang padat penduduknya atau di tempat-tempat keramaian; 2) kampanye manfaat sampah khusus di sekolah-sekolah dalam bentuk poster atau gambar-gambar menarik lebih digelorakan; 3) baliho yang menampilkan Bank sampah yang sukses seperti “Bank

Sampah Mutiara" dan para nasabah sampahnya di tempat-tempat strategis tidak dilakukan; dan 4) Keterlibatan radio swasta dan TV Swasta mengkampanyekan sampah dan manfaatnya belum dilakukan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolan Bank Sampah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Target tahun 2016 akan terbentuk 4 Bank Sampah di Kecamatan Kota Timur, Sipatana, Pulubala, dan kecamatan Wonggaditi, tetapi kenyataannya Bank Sampah yang berjalan dan efektif beroperasi hanya Bank Sampah yang di Kecamatan Kota Timur Kelurahan Moodu. Bank sampah tersebut adalah Bank Sampah Mutiara yang dipimpin oleh Bapak Purwanto.
2. Bank Sampah Mutiara telah mengelamai perkembangan yang sangat baik, karena telah memiliki sejumlah nasabah yang siap sebagai pemasok sampah secara rutin, baik diantar atau dijemput sendiri oleh pengelola Bank Sampah Mutiara. Artinya telah terjadi kerja team antara pengelola Bank sampah dengan para nasabah sampah secara simbiosis mutualisme.
3. Bank Sampah Mutiara telah membangun jaringan kerja/ relasi dengan Bank Sulut Cabang Gorontalo dan Inspektorat Kota Gorontalo dalam hal pengelolaan Bank Sampah sebagai bentuk penguatan Bank Sampah Mutiara yang dibina oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.
4. Upaya untuk menyukseskan Kota Gorontalo Bebas Sampah tahun 2018 melampaui target nasional 2020 secara bertahap telah dilakukan, tetapi masih kurang dari penyesiapan wadah penampungan sampah sementara di beberapa tempat yang banyak dikunjungi masyarakat. Akibatnya timbulan sampah masih saja terjadi, disamping frekuensi penjemputan sampah oleh mobil kenderaan sebatas 1 hari 1 kali jemput.

5. Pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R *(reduce, reuse, recycle)* telah memperlihatkan perkembangan yang berarti. Hal ini nampak pada timbulan-timbulan sampah yang tersebar di tempat-tempat penampungan sementara prosentase bahan-bahan bekas yang bernilai ekonomis seperti: kertas, dos-dos, wadah minuman (plastic dan kaleng) telah berkurang. Sampah yang dominan adalah sampah-sampah yang tidak dapat diolah kembali. Kemudian mobil-mobil pengangkut sampah disemua ruas jalan di wilayah Kota Gorontalo telah melakukan pemisahan sampah yang bernilai ekonomis.

6.2 Saran

1. Strategi pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara selektif dan terkontrol agar masyarakat yang diberdayakan memahami hak dan kewajiban mereka setelah diberdayakan. Sebab jika tidak dilakukan seperti itu, maka dianggap pemberdayaan tidak ada manfaatnya dan tidak ditindaklanjuti sesuai target dari pemberdayaan itu sendiri.
2. Pemerintah kota Gorontalo dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup harus bersinergi dengan para pihak dalam pengelolaan timbulan sampah di wilayah Kota Gorontalo dengan tetap mengedepankan pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep 3R.
3. Pengetahuan, sikap dan perilaku; kerja kelompok/team work; dan jejaring social/ relasi harus dibentuk pada masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan sampah, agar target pemerintah mengelola sampah secara kelembagaan melalui Bank sampah berjalan dengan baik.
4. Anggaran yang diperuntukkan untuk biaya operasional, kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah pada tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan untuk mensuport ketercapaian target Kota Gorontalo Bebas Sampah 2018 melampaui target nasional Indonesia Bebas Sampah 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan. 2014. *Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah di Kota Bima Nusa Tenggara Barat.* Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 10 (2): hal 176-177

Dwiyanti, B.M. 2011. *Model Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12, Nomor 2 (Desember) hal. 245.

Gelar Priambodo. 2012. *Mengangkat Derajat sampah lewat Bank Sampah.* diakses dari http://green.kompasiana.com/polusi/2013/07/15/mengangkat-derajat-sampah-lewat-bank-sampah-577051.html

Gulton, 2015. *Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan Secara Terpadu*. Jakarta: Jurnal Limbah Vol. 1 (Februari) hal. 16 – 26

Hardiyansyah, 2014. *Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang*. MIMBAR Vol. 30 No. 1 (Juni) hal. 109.

Kristina J. Helena. 2014. *Model Konseptual untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah di Indonesia.* Jurnal J@TI, Vol IX, No. 1 (Januari).

Miles & Hiberman, 1984: *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication

Mohamad, dkk. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.* Jurnal Health & Sport, Volume 5, Nomor 3, hal. 695-696.

Suyanto, dkk. 2015. *Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi "Green Community" Mendukung Kota Hijau. MIMBAR LPPM Unisba: Volume 31 No. 1. hal.* 148.

http://www.pressreader.com/diunduh tanggal 15/8/2016.

Lampiran 5

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pangkat/Golongan	Pembina/IVb
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	N I P	196706062000031001
5.	N I D N	0006066707
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Paguyaman, 06 Juni 1967
7.	E-mail	sukarman_kamuli@ung.ac.id
8.	Nomor Telepon/HP	0435824356 / 085240216450
9.	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6
10.	Alamat Rumah/Kode Pos	Jl. Kalimantan No. 52 Kota Gorontalo, 96128
10.	No Tlp/Fax	0435 821752
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 262 orang; S2 = 3 orang; S3 = - orang

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**	**S-3**
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan	Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung	Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Sosial	Ilmu Administrasi
Tahun Masuk-Lulus	Masuk 1987, Lulus 1991	Masuk 2002, Lulus 2004	Masuk 2008, Lulus 2011
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pengaruh Pembinaan KAMTIBMAS terhadap Kesadaran Hukum (suatu penelitian di SMA Negeri 1 Gorontalo	Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan terhadap

			Produktivitas Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara Prov. Gorontalo
Nama Pembimbing	Drs. Ahmad Isa, (Alm) Johan Jasin, SH	Dr. Budiman Rusli, MS Drs. Darmawan, MS	Prof. Dr. H. Dedi Rosadi, MS Prof. Dr. H. Budiman Rusli, MS Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, MS

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2010-2011	Pengaruh Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari (TMB) terhadap Produktivitas Nelayan Tradisional di Kabupaten Gorontalo Utara (Ketua Tim)	Hibah Fundamental Dikti	Rp. 17.500.000
3	2012	Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan RPJMN pada Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah Prov. Gorontalo (anggota tim)	Hibah BOPTN	Rp. 35.000.000
3	2012	Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara (Ketua Tim)	Kerjasama BALIHRISTI Prov. Gtlo.	Swakelola: Rp. 26.000.000
4	2013	Kaji Ulang Program Agropolitan Jagung di Provinsi Gorontalo (anggota tim	Hibah Kompetensi	Rp. 100.000.000
5	2014-2015	Evaluasi Implementasi Kebijakn Pengembangan Kawasan Minapolitan di Ka. Gorontalo Utara (Ketua Tim)	Hibah Bersaing	Rp. 30.000.000

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Kajian Kapasitas Pelaku dan Lembaga Pemerintah Daerah untuk Mewujud-kan Tata Pemerintahan Gorontalo.	Volume 5/Nomor: 1/ 2008	INOVASI, ISSN 1693-9034
2.	Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan *Good Governance* di Provinsi Gorontalo.	Volume 5/Nomor: 3/ 2008	INOVASI, ISSN 1693-9034
3.	Perencanaan Pegawai	Volume 6/Nomor: 3/ 2009	INOVASI, ISSN 1693-9034
4.	Otonomi Daerah dalam Mem-perkokoh Integritas Bangsa	Volume 7/Nomor: 4/ 2010	INOVASI, ISSN 1693-9034
5.	Filsafat Sistem	Volume 8/Nomor: 3/ 2011	INOVASI, ISSN 1693-9034
6.	Critical review Reformasi Paradigma Administrasi	Volume 8/Nomor: 4/2011	INOVASI, ISSN 1693-9034
7	Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari pada produktivitas nelayan tradisional	Volume 12/Nomor 1/2012	JIANA, ISSN 1411-948X

F. Pengalaman Tim Seleksi (TIMSEL)

1. Timsel Calon Pejabat Tinggi Pratama Kota Gorontalo tahun 2015

2. Timsel Calon Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Boalemo tahun 2015

3. Timsel Calon Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Pohuwato tahun 2016

4. Timsel Calon Pendamping Profesional Kerjasama UNG dengan Kemendes RI tahun 2016

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Cakrawala Perubahan (Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan **Judul Tulisan:** Tantangan dalam Membangun Karakter	2013	9 halaman	UNG PRESS

	Bangsa Pasca Reformasi			
2	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (Tim Penulis(	Cetakan Pertama 3013 Cetakan Kedua 2015	126 halaman	Ideas Publishing
2	Minapolitan: Dimensi Kebijakan, Kelembagaan dan Pemberdayaan Nelayan di Gorontalo Utara	2015	147 halaman	Pustaka Indonesia Press

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, November 2016

Dr. Sukarman Kamuli, M.Si

BIODATA RASYID YUNUS